

Laporan Kinerja



TRIWULAN II TAHUN 2021



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
2021

Kata Pengantar



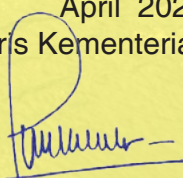
■ Foto oleh Tom Fisk dari Pexels

Sebagai Kementerian yang mengkoordinasikan pembangunan dibidang kemaritiman dan investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah menyusun Laporan Kinerja Triwulanan untuk dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 bertujuan untuk menilai progress pencapaian target kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan di awal tahun 2021. Laporan ini juga merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung (*intermediate evaluation*) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemenko Marves untuk dapat memenuhi target sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai progres pencapaian target dalam mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan melalui indikator kinerja yang terukur. Informasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, sehingga upaya pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kritik, masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Jakarta, April 2021
Sekretaris Kementerian Koordinator



Agung Kuswandono

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan II tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan Renstra Kemenko Marves tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi. Laporan Kinerja ini juga merupakan alat kendali sekaligus pemacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders guna perbaikan kinerja. Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2021 tercapai 47%, hal ini karena beberapa target kinerja dari IKU direncanakan akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja Kemenko Marves sampai dengan triwulan II Tahun 2021 yang dikelompokkan dalam 4 *perspective* adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* terdiri dari 3 (tiga) SS yaitu:
 - a. Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat;
 - b. Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional;

■ Foto oleh Andrew Neel dari Pexels

- c. Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur.

Pada triwulan II untuk 3 SS pada *Stakeholder Perspective* belum dapat menyajikan capaian atas target kinerja, capaian kinerja ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

2. *Customer Perspective* terdiri dari 5 (lima) SS yaitu:

- a. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional;
- b. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis;
- c. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
- d. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam;
- e. Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara

Untuk 5 SS di atas sampai dengan triwulan II belum dapat menyajikan capaian atas target kinerja, capaian kinerja ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

3. *Internal Business Process* terdiri dari 2 (dua) SS yaitu:

- a. Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien;
- b. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien.

4. *Learning and Growth* dengan 4 (empat) SS, dengan rincian:

- a. Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional;
- b. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik
- c. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang Terintegrasi, belum ada target dan capaian kinerja;
- d. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi;
- e. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Pada triwulan II target atau capaian kinerja yang diperoleh atas SS Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik dengan IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yaitu dari target 80 realisasi 75,18 (93,98%). namun demikian Kemenko Marves berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%. Sedangkan untuk SS lainnya pada *Learning and Growth* belum dapat disajikan, karena target akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Stakeholder Perspective

SS 1 Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	SS 2 Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	SS 3 Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur
Capaian : n/a	Capaian : n/a	Capaian : n/a



CUSTOMER Perspective

SS 4 Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	SS 5 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	SS 6 Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia
Capaian : n/a	Capaian : n/a	Capaian : n/a
SS 7 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	SS 8 Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	
Capaian : n/a	Capaian : n/a	



Internal Business Process Perspective

SS 9 Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	SS 10 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisen
Capaian : n/a	Capaian : n/a

Foto oleh Andrew Neel dari Pexels

Learning and growth PERSPECTIVE

SS
11

Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional

Capaian : n/a

SS
12

Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang baik

Capaian : 93,98

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang terintegrasi

Capaian : n/a

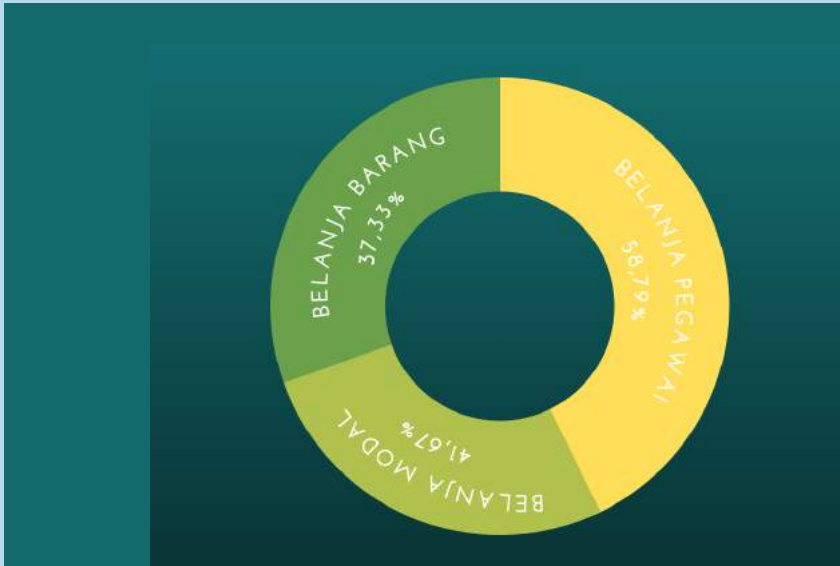
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Capaian : n/a

Realisasi anggaran Kemenko Marves sampai dengan triwulan II tahun 2021 dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 284.452.093.000, secara garis besar terdiri dari 4 jenis belanja, namun Kemenko Marves hanya melaksanakan 3 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai dengan pagu Rp. 55.028.210.000; belanja barang dengan pagu anggaran Rp. 224.984.014.000, dan belanja modal Rp. 4.439.869.000. Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja sampai dengan triwulan II tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini:

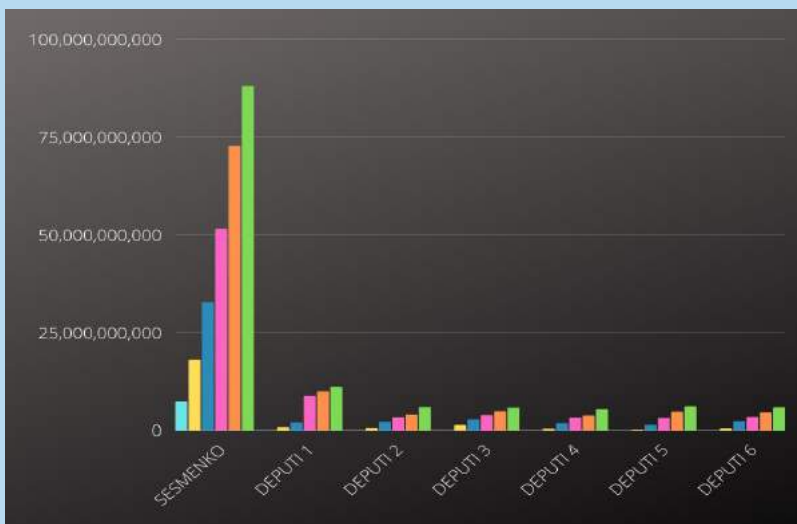
Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Pegawai	55.028.210.000	32.350.620.164	58,79%	22.677.589.836
Barang	224.984.014.000	83.988.563.187	37,33%	140.995.450.813
Modal	4.439.869.000	1.849.885.500	41,67%	2.589.983.500
Total	284.452.093.000	118.189.068.851	41,55%	166.263.024.149

Sumber: OMSPAN, Juni 2021



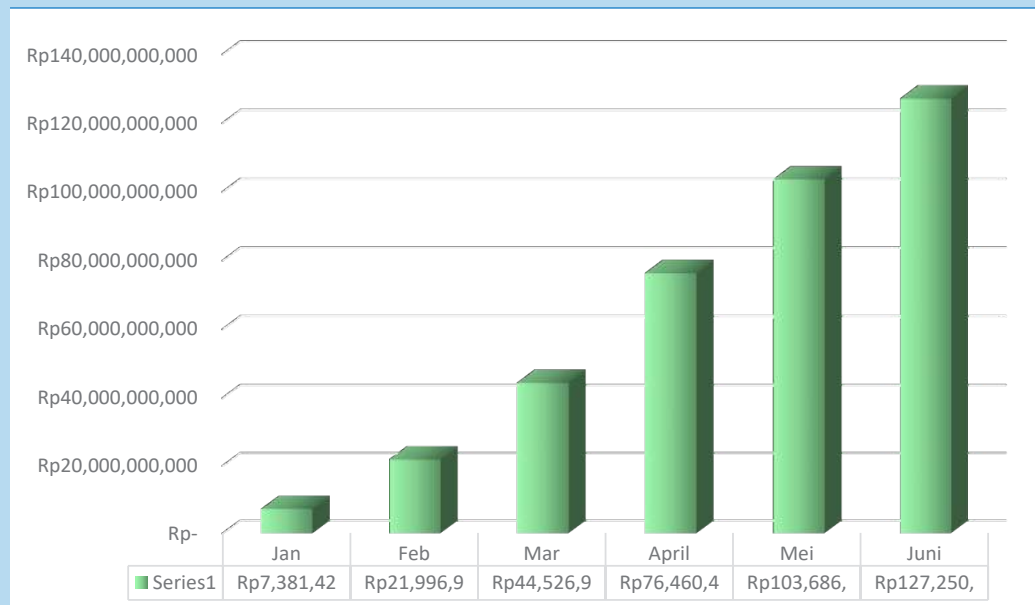
Dari tabel dan diagram tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tertinggi dari belanja pegawai mencapai 58,79% atau Rp. 32.350.620.164 sedangkan belanja terendah adalah belanja barang dengan realisasi 37,33 % atau Rp. 83.988.563.187.

Sedangkan realisasi pagu anggaran pada masing-masing unit kerja sampai dengan triwulan II tidak terlalu jauh perbedaannya. Unit Eselon I dengan nilai persentase realisasi keuangan tertinggi adalah Sekretariat Kemenko Rp. 88.025.634.93 (53,48%). Sementara unit dengan nilai persentase realisasi terendah adalah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Rp. 10.995.104.721 (23,17%). Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II perbulan antara T.A. 2021 tidak merata. Hal ini dikarenakan masih dihadapi dengan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja setiap bulannya. Lonjakan terjadi pada bulan Juni setiap unit kerja Eselon I mengalami peningkatan realisasi dibanding bulan sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut:



Sumber: OMSPAN, 2021

Realisasi anggaran perbulan sampai dengan triwulan II tahun 2021 tidak merata namun realisasi setiap bulannya mengalami peningkatan, kendati masih dihadapi dengan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja setiap bulannya. Lonjakan terjadi pada bulan Juni, setiap unit kerja Eselon I mengalami peningkatan realisasi belanja dibanding bulan sebelumnya seperti terlihat pada grafik berikut:



Grafik 2 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021

Sumber: OMSPAN, 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	i	Daftar Gambar	ix
Ringkasan Eksekutif	ii	Daftar Grafik	ix
Daftar Isi	vi	Daftar Tabel	x
		Daftar Singkatan dan Pengertian	xi
01		02	
PENDAHULUAN	1	PERENCANAAN KINERJA	11
Tugas dan Fungsi	1	Rencana Strategis	11
Organisasi Kemenko Marves	3	Program dan Kegiatan Tahun 2021	15
Peran Strategis	5	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Sistematika Penulisan	9	Indikator Kinerja Utama	16
		Penghitungan Capaian Kinerja	20
03			
AKUNTABILITAS KINERJA	22		
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021	22	SS.6. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	39
SS.1 Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat	24	Indeks Kesehatan Laut	
Indeks Kepemimpinan Maritim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
SS.2 Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional	27	SS.7 Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	47
PDB Maritim		PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri	
SS.3 Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	28	SS.8 Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	51
Indeks Daya Saing Global (IDSG)		Indeks Kapabilitas Inovasi	
SS.4 Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	31	SS.9 Tersedianya Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	52
Indeks Kedaulatan Maritim		Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan	
SS.5 Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	33	SS.10. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	53
Indeks Kinerja Logistik		Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	
Indeks Disparitas Ekonomi			

SS.11 Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional Indeks Profesionalitas ASN	55	SS.14 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel Opini BPK	61
SS.12 Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	57	Capaian Lainnya Inovasi Kemenko Marves Analisa Sumber Daya Pegawai Kinerja Keuangan	63
SS.13 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	59	Realisasi Anggaran Realisasi per Jenis Belanja Realisasi Per Unit Kerja Realisasi Per Bulan	65

04

PENUTUP	69
Kesimpulan	11
Langkah Perbaikan Kedepan	

05

LAMPIRAN	71
Perjanjian Kinerja	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 7 K/L dibawah Koordinasi Kemenko Marves	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Kemenko Marves	4
Gambar 3. Peta Strategis Kemenko Marves	13
Gambar 4. Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Validitas IKU	20
Gambar 5. Bobot Bukti Hasil Kinerja	21
Gambar 6. Surat Izin Prakarsa	33
Gambar 7. Goals Indeks Kesehatan Laut	40
Gambar 8. Lokasi Pilot Project Implementasi IKLI	42
Gambar 9. Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015 – 2020	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Realisasi Anggaran per Unit Kerja Kemenko Marves TA. 2021	v
Grafik 2 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021	vi
Grafik 3 Diagram Pegawai Kemenko Marves Berdasarkan Jenjang Pendidikan	64
Grafik 4 Jumlah Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat	65
Grafik 5 Diagram Persentase Pencairan Belanja s.d TW II Tahun 2021	66
Grafik 6 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis Kemenko Marves 2021	13
Tabel 2 Program dan Kegiatan Tahun 2021	15
Tabel 3 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I	16
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kemenko Marves Tahun 2021	17
Tabel 5 Capaian Kinerja SS.1 TW II	25
Tabel 6 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 1	26
Tabel 7 Capaian Kinerja SS.2 TW II	28
Tabel 8 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 2	28
Tabel 9 Capaian Kinerja SS.3 TW II	29
Tabel 10 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 3	29
Tabel 11 Capaian Kinerja SS.4 TW II	32
Tabel 12 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 4	32
Tabel 13 Capaian Kinerja SS.5 TW II	34
Tabel 14 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 5	35
Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 6	38
Tabel 16 Capaian Kinerja SS.6 TW II	39
Tabel 17 Nilai Variabel Masing-masing Bobot	41
Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 7	41
Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 8	43
Tabel 20 Capaian Kinerja SS.7 TW II	47
Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 9	47
Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 10	50
Tabel 23 Capaian Kinerja SS.8 TW II	51
Tabel 24 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 11	51
Tabel 25 Capaian Kinerja SS.9 TW II	52
Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 12	52
Tabel 27 Capaian Kinerja SS.10 TW II	53
Tabel 28 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 13	54
Tabel 29 Capaian Kinerja SS.11 TW II	55
Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 14	56
Tabel 31 Capaian Kinerja SS.12 TW II	57
Tabel 32 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020	58
Tabel 33 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 15	59
Tabel 34 Capaian Kinerja SS.13 TW II	60
Tabel 35 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 16	61
Tabel 36 Capaian Kinerja SS.14 TW II	61
Tabel 37 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 17	62
Tabel 38 Realisasi Belanja s.d Triwulan II Tahun 2021	66
Tabel 39 Realisasi Belanja Per Unit Eselon I s.d TW II Tahun 2021	67

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menko	: Menteri Koordinator Bidang
PDB	: Produk Domestik Bruto
RB	: Reformasi Birokrasi
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kemaritiman	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sesmenko Kemaritiman	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran
TKM	: Tingkat Keselamatan Maritim
TKW	: Tingkat Kepastian (ke)Wilayahan
TKKM	: Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

An aerial photograph of a port area. In the foreground, a large container ship is docked, its deck filled with stacks of colorful containers (red, blue, green, white). A large blue and red gantry crane is positioned over the ship. The background shows a vast yard filled with numerous stacks of containers, some organized in neat rows and others more haphazardly. Several yellow and green vehicles, likely forklifts or cranes, are visible on the ground. The overall scene is one of intense industrial activity.

01

Pendahuluan

■ Photo by Tom Fisk from Pexels

Laporan Kinerja Kemenko Marves Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan II tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan Renstra Kemenko Marves tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, menuju poros maritim dunia melalui pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi.

1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tugas dari Kemenko Marves yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi:

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi

01

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang kemaritiman dan investasi

02

Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi

03

Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet

04

Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian /Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud

05

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

06

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves

07

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves yaitu:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Lementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.



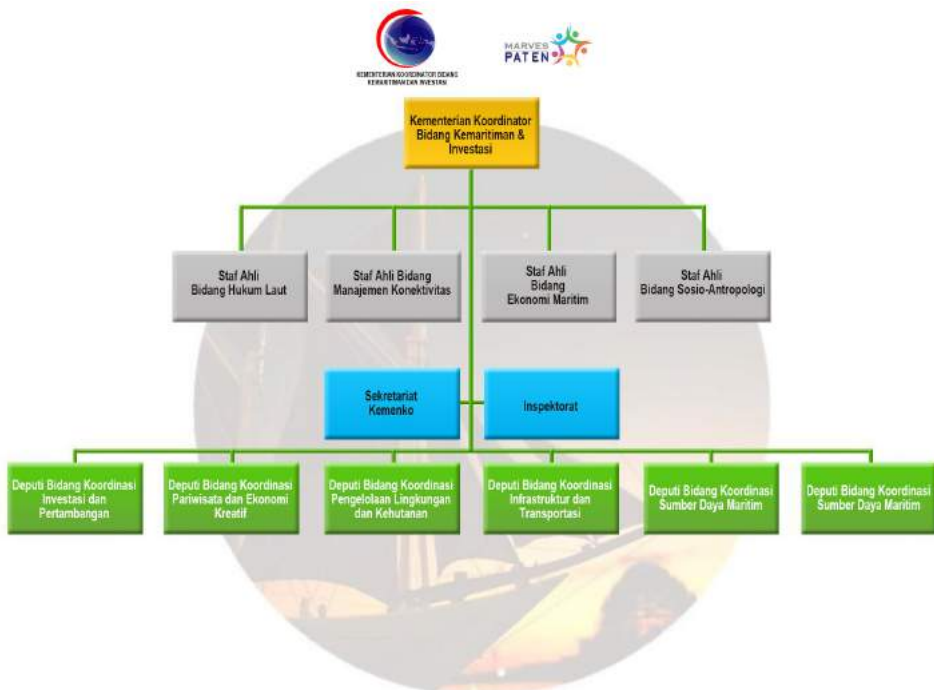
Gambar 1. 7 K/L dibawah Koordinasi Kemenko Marves

1.2. Organisasi Kemenko Marves

Kemenko Marves dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, organisasi Kemenko Marves sampai dengan unit eselon I selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sesuai Permenko Nomor 10/2020 Kemenko Marves terdiri dari terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator, 6 (enam) Deputi, 4 (empat) Staf Ahli, dan Inspektorat, sebagai berikut:



Susunan organisasi Kemenko Marves berdasarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2019 terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Kemenko Marves

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kemenko Marves, sebagai berikut:

Sekretariat Kemenko	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.
Staf Ahli	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
Inspektorat	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenko Marves.

1.3. Peran Strategis

Peran strategis Kemenko Marves dalam melaksanakan pembangunan dibidang kemaritiman dan investasi yaitu dengan adanya 3 (tiga) mandat langsung dari Presiden Jokowi kepada Menko Marves pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju, yaitu: 1) Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia; 2) Menangani hambatan-hambatan investasi; dan 3) Merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar.

Selanjutnya arahan Presiden Jokowi dipertegas terkait tugas Menko yang harus dilaksanakan di Bidang Marves yaitu:



Permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi yaitu:

- Biaya logistik masih menjadi permasalahan yang cukup pelik, dipicu oleh konektivitas maritim yang belum baik;
- Permasalahan industri Pertambangan muncul seperti permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Permasalahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2021 ini sebagaimana juga dihadapi oleh sektor-sektor lainnya adalah masih mewabahnya pandemi *corona virus* (Covid-19) di seluruh dunia;
- Disparitas pembangunan yang direpresentasikan dari peta investasi;
- Ketersediaan data kinerja logistik khususnya yang terkait dengan distribusi antar pulau menjadi sangat penting karena dapat mengetahui permasalahan logistik (*bottleneck logistics*) dalam pengiriman barang antar pulau dan membandingkan indikator daya saing perdagangan antar pulau, khususnya biaya dan waktu antar rute-rute tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus pada 6 program prioritas bidang yaitu:

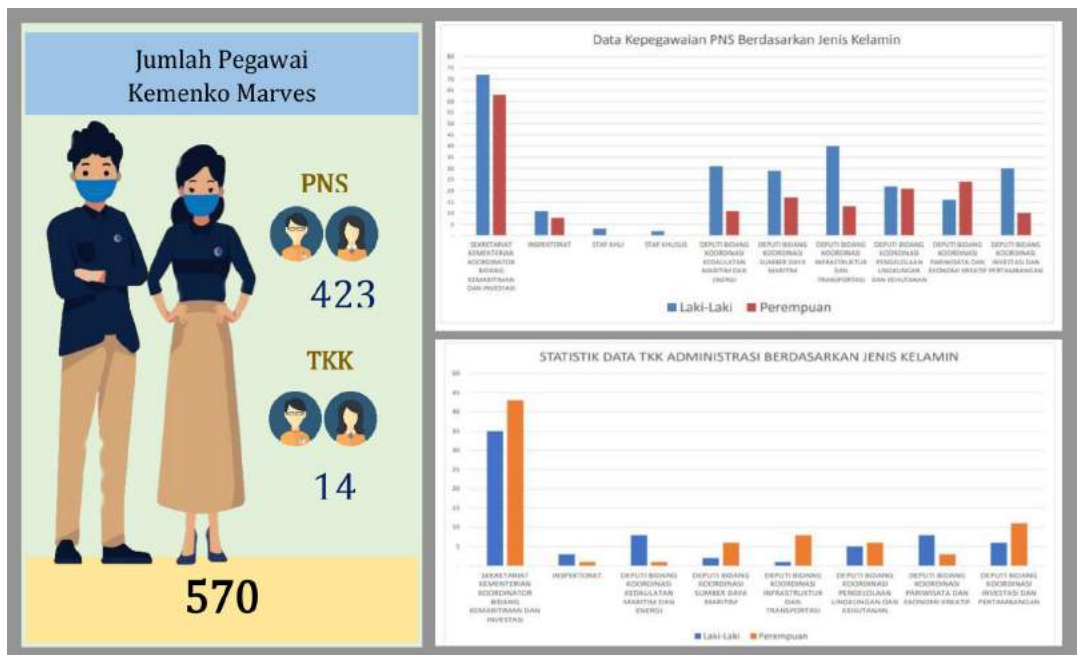
6 Program Prioritas



1.4. Sumber Daya Kemenko Marves

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kemenko Marves sampai dengan saat ini memiliki 570 pegawai, dengan rincian PNS 473 pegawai dan TKK 147 pegawai. Jumlah pegawai berstatus PNS berjenis kelamin laki-laki 256 orang, dan perempuan 167 orang. Sedangkan pegawai yang berstatus TKK berjenis kelamin laki-laki 68 orang dan perempuan 79 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:



STATISTIK DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	256	167	423
I.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	72	63	135
II.	INSPEKTORAT	11	8	19
III.	STAF AHLI	3	-	3
IV.	STAF KHUSUS	2	-	2
V.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI	31	11	42
VI.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM	29	17	46
VII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI	40	13	53
VIII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN	22	21	43
IX.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16	24	40
X.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN	30	10	40

STATISTIK DATA TKK ADMINISTRASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	68	79	147
I.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	35	43	78
II.	INSPEKTORAT	3	1	4
III.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI	8	1	9
IV.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM	2	6	8
V.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI	1	8	9
VI.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN	5	6	11
VII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	8	3	11
VIII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN	6	11	17

Sumber: Biro Umum, 2021

1.4.2. Sarana Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kemenko Marves didukung dengan adanya sumberdaya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Gedung Kemenko Marves, Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran, adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut:

Prasarana & Sarana

Penunjang tugas Kemenko Marves

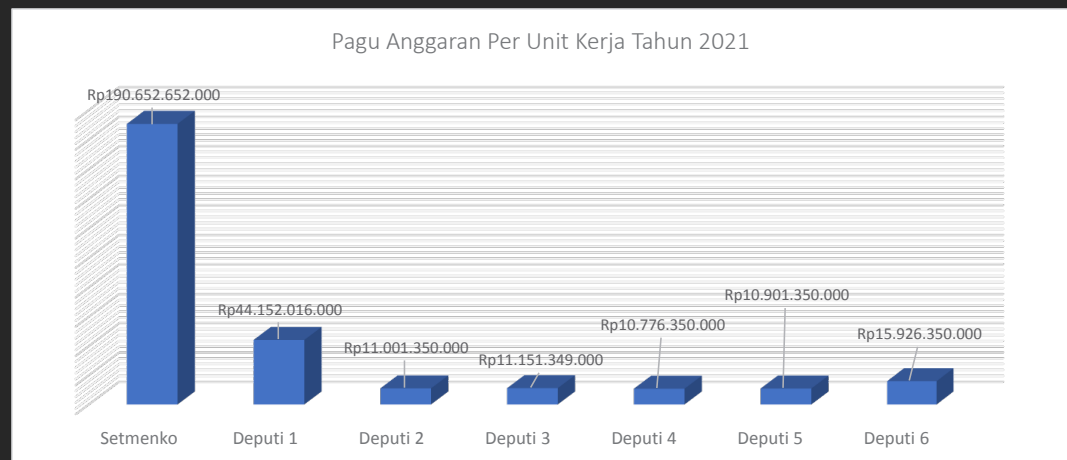
Mobil Operasional 77 unit	Sepeda Motor Operasional 19 unit	Lemari (arsip/filing cabinet/pakaian/brankas) 295 unit	CCTV 26 unit	Projektor 38 unit	Kamera (SLR/Mirrorless/Bawah Air) 67 unit
PC/Laptop/Notebook/ Tablet 915 unit	Printer & Scanner 382 unit	Meja (Kerja/Tamu/Sudut/Rapat) 375 unit	Kursi (Kerja/Tamu/Sofa/Rapat) 1.572 unit	Telepon/HP 72 unit	Faxmili 7 unit
Handy Talky 60 unit	Drone 6 unit	Alat Pemadam Api/Kebakaran 90 unit	Peralatan Lainnya 27 unit	UPS (uninterruptible power supply) 8 unit	TV 106 unit

Sumber: Biro Umum, 2021

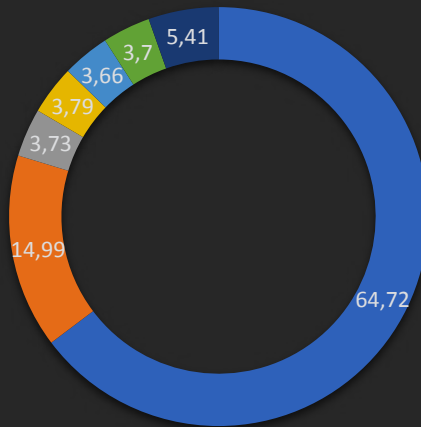
Untuk rincian secara lengkap prasarana dan sarana penunjang tugas Kemenko Marves bisa diakses melalui link: <https://bit.ly/DataDukungMarves2021>.

1.4.3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Kemenko Marves TA. 2021 telah disahkan pada tanggal 23 November 2020, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor : SP DIPA-120.01-0/2021 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 314.596.417.000 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah),- , namun dengan adanya kebijakan refocusing dari DJA Kementerian Keuangan, Kemenko Marves melakukan revisi sesuai dengan terbitnya DIPA terbaru Nomor: SP DIPA- 120.01.1.350494/2021, tanggal 16 Februari 2021 dengan jumlah DIPA sebesar Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Adapun rincian anggaran per unit kerja Kemenko Marves sebagai berikut:



Persentase Pagu Anggaran Per Unit Kerja



■ Setmenko ■ Deputi 1 ■ Deputi 2 ■ Deputi 3 ■ Deputi 4 ■ Deputi 5 ■ Deputi 6

Sumber: OMSPAN, 2021

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini secara umum berisi tentang capaian kinerja Kemenko Marves pada periode triwulan II 2021. Sebagai tolak ukur analisis keberhasilan kinerja yaitu membandingkan antara capaian kinerja (performance results) dengan rencana kinerja (performance plan). Dari hasil analisis capaian kinerja tersebut, diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumberdaya Kemenko Marves serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2021, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

1) Realisasi kinerja Kemenko Marves

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kemenko Marves berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3) Realisasi Kinerja lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Tugas Tambahan program dan kegiatan Kemenko Marves; (2) Capaian lainnya

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves selama Triwulan II tahun 2021 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja tahun 2021, kegiatan s.d triwulan II tahun 2021, penghitungan pencapaian IKU unit kerja, Data dukung lainnya terhadap pencapaian IKU.



Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Maka, Visi Kemenko Marves sebagai organisasi yang membantu Presiden guna mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden di bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu:

“Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini merupakan implementasi Visi Presiden yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh



nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita. Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, untuk mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, Kemenko Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**Misi
01**

Peningkatan kualitas manusia Indonesia

**Misi
02**

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

**Misi
03**

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

**Misi
04**

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

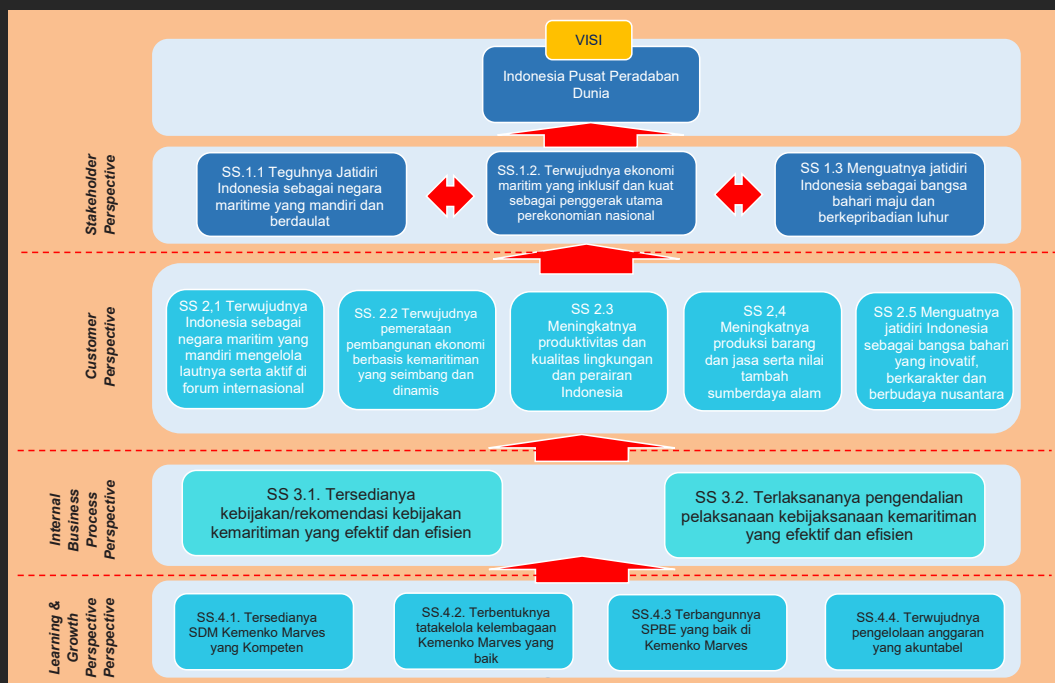
**Misi
05**

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kemaritiman Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Kemenko Marves menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini:



Peta strategis Kemenko Marves membagi sasaran kementerian ke dalam 4 (empat) perspective, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal bussines process perspective* dan *learning and growth perspective*. Peta strategi tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 5 (lima) sasaran strategis utama pembangunan kemaritiman Indonesia pada *Perspective Customer* (SS.4 s/d SS.8)

Sasaran strategis pembangunan Kemaritiman dan Investasi merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai oleh Kemenko Marves sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kemenko Marves tahun 2020-2024 seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Sasaran Strategis Kemenko Marves 2021

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Unit Penanggungjawab
 Stakeholder	SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	Efektifitas Kepemimpinan Maritim Seluruh Deputi
	SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	PDB Maritim Seluruh Deputi
	SS.3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	Indeks Daya Saing Global (IDSG) Seluruh Deputi
 Customer	SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	Indeks Kedaulatan Maritim Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
	SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	Indeks Kinerja Logistik Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
			Indeks Disparitas Ekonomi 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
	SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Indeks Kesehatan Laut Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa Seluruh Deputi
Tingkat Komponen dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi			
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	Indeks Kapabilitas Inovasi 1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan Seluruh Deputi

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Unit Penanggungjawab
Internal Business Process	Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien		
	SS.10 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	Seluruh Deputi
 Learning and Growth	SS.11 Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Sekretariat Kemenko
	SS.12 Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Sekretariat Kemenko
	SS.13 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sekretariat Kemenko
	SS.14 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK	Sekretariat Kemenko

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Kemenko Marves pada tahun 2021 memiliki 2 program yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dengan 1 kegiatan; 2) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dengan 7 kegiatan. Penyusunan anggaran Tahun 2021, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA, Kemenko Marves mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 314.596.417.000,-, (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) namun pada bulan Februari 2021 mengalami revisi anggaran, sehingga jumlah pagu anggaran yang diterima oleh Kemenko Marves sebesar Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah) hal ini karena adanya refocusing anggaran dari DJA Kementerian Keuangan. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 kegiatan yang terangkum dalam 2 program. Adapun nama program dan kegiatan sebagai berikut:



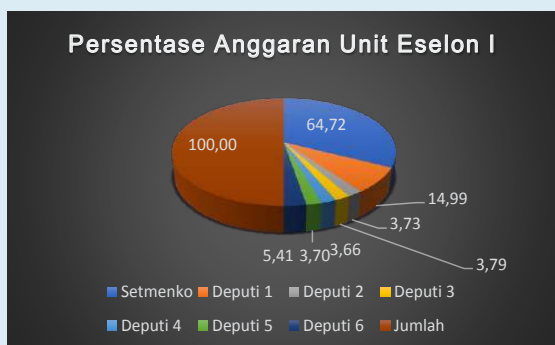
Tabel 2 Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Kode Kegiatan	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Unit Kerja
		Program Dukungan Manajemen	190.652.652.000,-	Setmenko
1	5601	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	190.652.652.000,-	Setmenko
		Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan		
2	4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	44.152.016.000,-	Deputi 1
3	4831	Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.001.350.000,-	Deputi 2
4	4832	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	11.151.349.000,-	Deputi 3
5	5996	Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10.776.350.000,-	Deputi 4
6	6002	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.901.350.000,-	Deputi 5
7	6008	Koordinasi Investasi dan Pertambangan	190.652.652.000,-	Deputi 6
TOTAL			Rp. 294.561.417.000,-	

Anggaran sebesar Rp. 294.561.417.000,- tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya 14 sasaran strategis Kemenko Marves tahun 2021 sehingga alokasi anggaran per unit kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I

Unit Kerja	Pagu Anggaran	%
Setmenko	190.652.652.000,-	64,72
Deputi 1	44.152.016.000,-	14,99
Deputi 2	11.001.350.000,-	3,73
Deputi 3	11.151.349.000,-	3,79
Deputi 4	10.776.350.000,-	3,66
Deputi 5	10.901.350.000,-	3,70
Deputi 6	15.926.350.000,-	5,41
Jumlah	Rp. 294.561.417.000,-	100



Berdasarkan rincian alokasi anggaran di atas, alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kemenko Marves yaitu sebesar Rp. 190.652.652.000,- (64,72%). Sedangkan alokasi pagu anggaran terkecil yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Deputi 4) sebesar Rp. 10.776.350.000,- (3,66%).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian kinerja tingkat Kemenko Marves tahun 2021 telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kemenko Marves berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kemenko Marves Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3
		2	PDB Maritim	%	6,31	6,63	6,99	7,41	7,80
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perkenomian Nasional	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	Nilai	64,6	65	65,4	65,8	66
SS.3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	4	Indeks Kedaulatan Maritim	Nilai	3	3	3	4	4
SS.4	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		6	Indeks Disparitas Ekonomi	Nilai	~0	~0	~0	~0	~0
SS.5	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut	Nilai	65	65	66	66	67
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,95	67,33	67,7	68,08	68,53
SS.6	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai	9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	Nilai	15,86	16,31	16,79	17,19	17,73

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Tambah Sumber Daya Alam	10	Tingkat Komponen dalam Negeri	Nilai	44	45	46	48	50
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	Nilai	38	38,6	39,5	40,5	41,5
SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas ASN	%	71	73	75	78	81
SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Nilai	75	80	85	90	95
SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3	3,3	3,6	3,8	4,0
SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Penandatanganan perjanjian kinerja (PK) Menteri Koordinator dilakukan pada bulan Januari 2021 dan selanjutnya diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon I, II, III dan IV. Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penjabaran dari IKU Kemenko Marves yang harus dicapai pada tahun 2021.

B. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, Sasaran Strategis Kemenko Marves didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

NO	SS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan		
1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 41,652,016,000
2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp1.000.000.000,-
3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 1.825.000.000
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 1.435.270.000,-
4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 6.581.220.000
5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 592.201.000,-
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 4.305.810.000,-
6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp 11,001,350,000,-
		Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Rp 3.216.515.000,-
7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 2.179.860.000
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 1.000.000.000,-
		Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 868.336.000,-
		Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Rp. 922.605.000,-
8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang	Koordinasi Sumber Daya Maritim	

NO	SS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.825.000.000,-
9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 874.640.000,-
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 3.750.000.000,-
10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 3.750.000.000,-
II	Program Dukungan Manajemen		
11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp 183.543.328.000,-
12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik		Rp 903.720.000,-
13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi		Rp. 3.000.000.000,-
14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		Rp. 3.218.705.000,-

Catatan:

1. Anggaran yang dialokasikan sebelum dilakukan refocusing dalam rangka pemotongan anggaran
2. Akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil refocusing anggaran

2.4. Penghitungan Capaian Kinerja

Dalam menghitung capaian realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:

- a. Penghitungan capaian dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:



Gambar 4 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Validitas IKU

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

	Kategori Penilaian	Bobot
Bobot Hasil Kerja	Sesuai	1
Bobot Hasil Kerja	Belum Relevan	0,5
Bobot Hasil Kerja	Tidak Sesuai	0

Gambar 5 Bobot Bukti Hasil Kinerja

- Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2.

$$\text{Capaian Final IKU} = \frac{\text{Eviden} + \text{Capaian IKU}}{2}$$

- Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagi terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

- Perspective didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per Perspective

$$\text{Perspective} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

- Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian Perspective dengan bobot Perspective yang dibagi terhadap total bobot Perspective.

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$



Akuntabilitas Kinerja

03

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kemenko Marves. Sejak tahun 2016 Kemenko Marves telah menerapkan model *Balanced Score Card* (BSC) dalam pengelolaan kinerjanya. Salah satu keunggulan pengelolaan kinerja dengan konsep BSC adalah disusunnya Strategi Kemenko Marves yang komprehensif dalam suatu peta strategi yang mencakup empat perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Dalam implementasinya, Kemenko Marves terus berusaha untuk menyempurnakan model pengelolaan kinerja dengan konsep BSC agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan best practice sektor publik secara internasional. Dari masing-masing perspektif tersebut, Kemenko Marves kemudian merumuskan sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kemenko Marves. SS, IKU dan target kinerja tersebut kemudian dimuat dalam dokumen Komitmen Kinerja Menko Marves dan Deputi. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah dashboard yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenko Marves yang dikenal dengan nama Peta Strategi Kemenko Marves.

Peta strategi tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) ke seluruh unit eselon I sampai dengan level terendah di Kemenko Marves, serta dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan dilaksanakannya proses *cascading* dan *alignment*, pencapaian strategi Kemenko Marves diharapkan selaras dan didukung oleh seluruh unit dan pegawai pada setiap level. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenko Marves meliputi seluruh tahapan dalam eksekusi strategi Kemenko Marves yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, review dan penyempurnaan kontrak kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Kemenko memiliki 14 Sasaran Strategis dengan 17 indikator kinerja utama (IKU). Target kinerja Kemenko Marves pada tahun 2021 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Menko Marves terdiri dari 14 (empat belas) sasaran strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja tersebut disusun dalam 4 (empat) perspective yaitu *stakeholders perspektive* (bobot 15%), *customer perspective* (bobot 25%), *internal business perspective* (bobot 40%), serta *learning and growth perspective* (bobot 20%).

Kinerja Kemenko Marves tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua pelaksanaan Renstra Kemenko Marves periode 2020-2024. Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2021 tercapai 47%, hal ini karena capaian atas target masing-masing IKU hampir seluruhnya dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), hanya 1 IKU yang telah dicapai pada triwulan II, yaitu Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, dengan capaian 93,98%. Namun demikian beberapa program dan kegiatan dalam upaya pencapaian atas target IKU disajikan pada masing-masing IKU.

Adapun capaian kinerja utama Kemenko Marves sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang diuraikan berdasarkan sasaran strategis (SS) adalah sebagai berikut:



PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	TAHUN 2021	%
 Stakeholder	Stakeholder							n/a
	SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	n/a	n/a	>=3	n/a
	SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	n/a	n/a	6,63	n/a
	SS.3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	n/a	n/a	65	n/a
 Customer	Customer							n/a
	SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Indeks Kedaulatan Maritim	n/a	n/a	3	n/a
	SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	n/a	n/a	3.1	n/a
			6	Indeks Disparitas Ekonomi	n/a	n/a	0	n/a
	SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut	n/a	n/a	57	n/a
			8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	n/a	67.33	n/a
	SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	n/a	n/a	16.31	n/a
			10	Tingkat Komponen dalam Negeri	n/a	n/a	45	n/a
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	n/a	n/a	38,6	n/a	

Internal Business Process								n/a
Internal Business Process	SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	n/a	n/a	100	n/a
	SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	n/a
Learning and Growth								23,50
Learning and Growth	SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	85	n/a
	SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	75,18	80	93,98
	SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	n/a	3,3	n/a
	SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	n/a	n/a	WTP	n/a
Capaian Tahun 2021								47

*) Keterangan: Capaian dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspective

*) Digunakan nilai capaian maksimal 120%

Penjelasan capaian IKU untuk setiap SS diuraikan sebagai berikut:



Sasaran yang ingin dicapai dari SS.1. adalah kondisi Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim yang mandiri dan memiliki kedaulatan penuh. Sasaran Strategis ini menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Efektivitas Kepemimpinan Maritim. IKU ini merupakan hasil dari penegakan kedaulatan maritim dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman.

Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

Pada triwulan II tahun 2021, capaian Kemenko Marves terkait Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia dapat dideskripsikan dalam capaian atas Tingkat Kedaulatan Maritim dan Efektivitas Diplomasi.

a. Tingkat Kedaulatan Maritim

Capaian Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKW), Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM), dan Tingkat Keselamatan Maritim (TKM).

1. Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKW) yaitu terwujudnya kepastian hukum kewilayahan Indonesia dan terjaganya kepentingan nasional di luar yurisdiksi Indonesia. TKK ini dibentuk oleh 2 (dua) komponen yaitu: a) Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan; b) Persentase posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional
2. Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM) terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.
3. Tingkat Keselamatan Maritim (TKM) terbentuk oleh tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Tingkat Kedaulatan Maritim dihitung dengan menggunakan formula:



$$TKM = 30\%TKW + 35\%TKKM + 35\%TKM$$

01

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

b. Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim

Efektivitas Diplomasi Maritim diukur dengan tingkat partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di organisasi internasional bidang kemaritiman, dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia.

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Efektif
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Efektif
$50 < x \leq 75$	3	Efektif
$x > 75$	4	Sangat Efektif

Tabel 5 Capaian Kinerja SS.1 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	7.14	n/a	n/a	n/a
Capaian Indikator SS.1					n/a

Sampai dengan triwulan II tahun 2021 capaian terhadap IKU 1 belum ada capaian (n/a), hal ini karena target atas IKU akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Pada triwulan II tahun 2020 realisasi atas IKU dimaksud belum ada capaian, sedangkan target akhir tahun 2021 dengan nilai ≥ 3 , untuk dilakukan perbandingan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 1

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra
1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	n/a	n/a	≥ 3

Tercapainya target efektivitas kepemimpinan maritim pada tahun 2020 harus dapat dipertahankan pada tahun 2021, karena hal ini menunjukkan keberhasilan Kemenko Marves dalam mendorong tercapainya kondisi Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim dengan mandiri dan memiliki kedaulatan penuh. Ini artinya, negara mampu menguasai dan mengatur sumber daya maritim yang dimilikinya, mampu mengendalikan campur tangan asing dan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa dan negara.

Beberapa kegiatan atau isu yang ditangani selama triwulan II guna mendukung pencapaian efektivitas kepemimpinan maritim telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan Pengesahan Konvensi ILO C-188;
2. Pertemuan Terbatas dengan ILO Mengenai *Ship to Shore Rights Programme* (S2SR);
3. Pembahasan Rancangan Awal Dokumen Konvensi Regional Terkait *Marine Environmental Protection* di Laut Arafura dan Laut Timor;
4. Pertemuan Internasional terkait Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) di Indonesia;
5. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Archipelagic and Island States (AIS) Forum;
6. Pelaksanaan 19th *Ocean Panel Sherpa Meeting, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE);
7. *Session 2 on Marine Genetic Resources in Area Beyond National Jurisdiction from the Perspectives of ASEAN Member States*;
8. Sidang Virtual MEPC ke-76 IMO;

SS.2 merupakan tolak ukur tingkat pertumbuhan perekonomian maritim untuk mewujudkan pengelolaan semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta lahan di atas daratan yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan sebagai penggerak perekonomian nasional. Perwujudan dari SS ini, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama PDB Maritim. Data resmi PDB maritim diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan penghitungan dan hasil survei yang dilakukan.

Pengertian dari PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sementara ekonomi kemaritiman dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang secara langsung dan/atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan (yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta perairan lainnya termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Sehingga PDB Maritim adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim.

Tahun 2021 dinamika yang masih dihadapi yaitu Pandemi Covid-19, maka pada tahun 2021 BPS diharapkan dapat melakukan penghitungan terhadap indikator kinerja utama ini. Namun demikian, tugas dan fungsi Kemenko Marves dalam mendorong



tercapainya target PDB maritim tetap terus dilakukan melalui berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi harapannya dapat mencapai angka ideal yang diharapkan. Sehingga, untuk mengetahui kontribusi PDB maritim Tahun 2021, digunakan data riil kontribusi PDB maritim tahun 2021.

Tahun 2021 target dari PDB maritim sebesar 6,63 yang didasarkan terhadap pendekatan penghitungan yang dilakukan oleh BPS yakni dengan menentukan definisi dan sektor-sektor (klaster) yang masuk dalam ekonomi maritim yaitu: 1) Perikanan; 2) Energi dan sumber daya mineral; 3) Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 4) Sumber daya non konvensional; 5) Industri bioteknologi; 6) Industri kemaritiman; 7) Jasa kemaritiman; 8) Pariwisata; 9) Perhubungan; 10) Bangunan laut; 11) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Dari klaster tersebut, maka dipetakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dipresentasikan sebagai aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor yang masuk dalam penghitungan. Konsep dan definisi ekonomi maritim masih berdasar KBLI 2015 karena KBLI 2020 baru saja dikeluarkan BPS. Penghitungan estimasi Kontribusi PDB Maritim Tahun 2019 oleh LIPI juga menggunakan pendekatan yang sama namun dengan cakupan KBLI yang berbeda.

Hasil penghitungan capaian kinerja IKU sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum ada capaian (n/a), hal ini karena capaian IKU tersebut ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Capaian Kinerja SS.2 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
2	PDB Maritim	5,19	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 2					n/a

Target capaian IKU PDB Maritim sampai akhir tahun 2021 terlihat di bawah ini:

Tabel 8 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 2

No	IKU		Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
2	PDB Maritim	%	n/a	n/a	6,63	7,80

Sampai dengan triwulan II upaya yang dilakukan untuk mencapai terhadap target IKU ini, Kemenko Marves telah melakukan koordinasi dengan K/L teknis. Target tahun 2021 ini akan dihitung pada akhir tahun sehingga akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 di tahun 2022.

SS3. bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi negara dengan jatidiri yang kuat sehingga tangguh dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin mengglobal. Jati diri ini ditunjukkan dengan daya saing yang dimiliki sebagai salah satu sumber dari ketahanan negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Peradaban dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul.



Capaian SS ini diukur dengan IKU Nilai Indeks Daya Saing Global (IDSG) yang menggambarkan kemampuan negara menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Nilai indeks ini dikeluarkan oleh World Bank dan terdiri dari dua belas pilar daya saing yaitu:



Dari 12 pilar *Global Competitiveness Index 4.0 framework* yang menjadi indikator penilaian indeks daya saing setiap negara, Kemenko Marves mendorong capaian melalui pilar ke-2 yang kemudian dibagi menjadi 2 sub indikator penilaian yaitu *transport infrastructure* dan *utility infrastructure*.

Pada tahun 2021, laporan IDSG dirilis oleh *World Economic* pada akhir tahun 2020, sehingga capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum ditargetkan (n/a) dan akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 di tahun 2022.

Tabel 9 Capaian Kinerja SS.3 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	5,19	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 3					n/a

Tabel 10 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 3

No	Indikator	Capaian TW II				Target 2021	Target Tahun 2024
		2018	2019	2020	2021		
3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	n/a	n/a	n/a	n/a	65	66

Kendati belum dapat menampilkan capaian atas indikator dimaksud, namun berapa faktor menjadi pendukung untuk mencapai target IKU ini sampai dengan triwulan II tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pengawalan proyek-proyek strategis pemerintah dan juga proyek prioritas;
2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pembuatan rekomendasi kebijakan ataupun pengendalian kebijakan guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Selain dari faktor pendukung untuk mencapai IKU, juga adanya faktor penghambat sampai dengan triwulan II, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan medan geógrafis yang sulit aksesnya;
2. Distribusi penduduk yang tidak merata;
3. Pandemic Covid-19.

Beberapa upaya lainnya yang dilakukan Kemenko Marves untuk meningkatkan peringkat IDSG diantaranya:

1. Menyediakan Infrastruktur konektivitas secara memadai, berdaya saing global, dan mempercepat pembangunan bidang transportasi;

2. Meningkatkan kembali koordinasi dan sinkronisasi yang terfokus pada penyederhanakan regulasi dalam rangka meningkatkan daya Tarik investasi di Indonesia. Dalam masa peralihan dari masa pandemic Covid-19 dan kondisi Indonesia yang belum ramah investasi disebabkan regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit. Selain itu, faktor eksternal dimana negara-negara saingan Indonesia semakin agresif menawarkan kemudahan untuk berinvestasi terutama dalam bidang infrastruktur dan transportasi;
3. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap proyek-proyek strategis pemerintah dan juga proyek prioritas sebagai upaya dalam mendukung peningkatan indeks daya saing infrastruktur;
4. Upaya percepatan-percepatan dan mengawal proyek strategis Nasional dan juga proyek-proyek yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 agar tarus berjalan sesuai rencana dan target pembangunan; salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan menjadi prioritas adalah meneruskannya pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan adalah merupakan Major Project RPJMN 2020-2024 (nomor 30). Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan.

Success story atas capaian IKU sampai dengan TW II, untuk mencapai IKU ini diantaranya:

1. Telah dilaksanakan Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Bengkulu:
 - Percepatan pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95 Km (Fisik: 61% dan pembebasan lahan: 92%);
 - Percepatan Pembangunan PSN Akses Air Minum Perpipaan (SPAM Benteng-Kobema).
 - Percepatan Pembangunan Jalan Lingkaran Luar Pulau Enggano (Pulau Terluar).
 - Pengendalian banjir kota Bengkulu dan rekayasa pantai.
2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perlindungan Investasi Dalam RPP Penyelenggaraan Rumah Susun dengan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pembangunan rumah susun bagi Pegawai Pemprov Maluku Utara.

Dengan capaian IDSG ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjaga pertumbuhan ekonominya, sehingga ke depannya diharapkan dapat mulai membangun kehidupan negara yang teratur sehingga terwujud sebuah peradaban. Ke depan upaya dalam mendorong peningkatan IDSG harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang infrastruktur sebagai salah satu pilar IDSG.

Tujuan yang ingin dicapai dari SS.4 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional. Tercapainya SS.4 ini diukur dengan indikator Tingkat Kedaulatan Maritim yang diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Wilayah, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat Keselamatan Maritim. Capaian Indeks Kedaulatan Maritim 2020 dihitung dengan formula:



$$TKM = 30\%TKW + 35\%TKKM + 35\%TKM$$

Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim.

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

Dengan demikian capaian SS.4 pada triwulan II sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 11 Capaian Kinerja SS.4 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
4	Indeks Kedaulatan Maritim	5,19	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 4					n/a

Tercapainya target SS.4 ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengelola lautnya dan merupakan negara yang aktif di forum internasional. Perbandingan capaian indeks ini antara triwulan II tahun 2021 dan triwulan II tahun 2020 belum dapat ditampilkan (n/a), hal ini karena pada tahun 2021 capaian atas IKU ini pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sedangkan untuk target akhir (tahun 2021) dengan nilai 3, hal ini seperti terlihat pada tabel berikut:

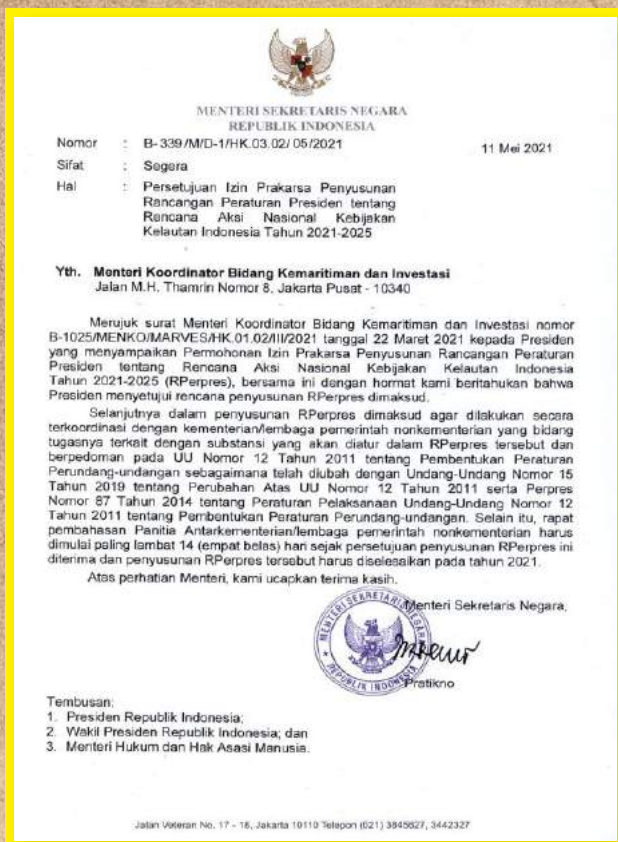
Tabel 12 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 4

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target Tahun 2024
4	Indeks Kedaulatan Maritim	n/a	n/a	3	4

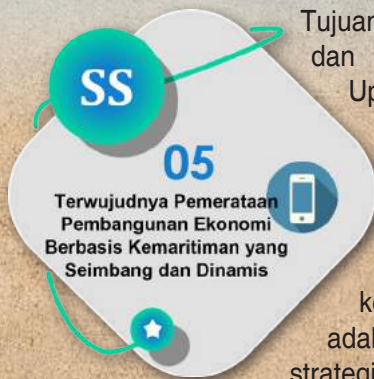
Di antara beberapa kegiatan atau isu yang ditangani selama triwulan II yang mendukung pencapaian tingkat kedaulatan maritim, Kemenko Marves telah melaksanakan pertemuan maupun tindakan-tindakan, sebagai berikut:

1. Penanganan 12 ABK WNI Terlantar di Mukalla, Yaman;
2. Rapat Koordinasi Penahanan Kapal dan Kapten MT Horse yang Ditahan di Batam;
3. Pelaksanaan Proses Percepatan Identifikasi Calon Area Perairan Pedalaman;
4. Penanganan Kasus Terbaliknya Kapal Ro Ro Billi di Dermaga Tebas Seberang, Sambas-Kalimantan Barat;
5. Rakor Lanjutan Repatriasi ABK LG yang Terlantar di Taiwan;
6. Penanganan ABK Kapal MV Mariman;
7. Lokakarya Nasional Percepatan Penyusunan Regulasi Nasional Peran Aktif Indonesia di KDLI dan Perkembangan Penyusunan Rancangan Regulasi Nasional Peran Aktif Indonesia di KDLI.

Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kedaulatan maritim, Kemenko Marves menginisiasi tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2020-2024, sampai dengan triwulan II telah menyampaikan Surat Permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden Melalui Sekretariat Negara (Surat Izin Prakarsa telah terbit melalui Surat Setneg nomor B-229/M/D-1/HK.03.02/05/21 tanggal 11 Mei 2021), diperkirakan target penetapan Perpres diundur pada Triwulan III.



Gambar 6 Surat Izin Prakarsa



Tujuan dari SS.5 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menurunkan biaya pengiriman barang, memangkas disparitas harga bahan pokok antar wilayah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat dilaksanakan diantaranya dengan meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik yang akan menjamin kelancaran arus barang. Kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui strategi:

- Menurunkan biaya logistik nasional yang memperlancar arus barang dan berdampak pada pemerataan
- Menyediakan Infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah

Representasi pelaksanaan target SS.5 dilakukan melalui berbagai bidang kemaritiman dengan fokus pada penanganan program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi serta program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis 5 (SS.5) dijabarkan dengan 2 indikator kinerja, yaitu; Indeks Kinerja Logistik dan Indeks Disparitas Ekonomi. Kedua indikator kinerja ini belum ditargetkan untuk Triwulan II 2021.

Tabel 13 Capaian Kinerja SS.5 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
5	Indeks Kinerja Logistik	5,19	n/a	n/a	n/a
6	Indeks Disparitas Ekonomi	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian SS.5					n/a

Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index/LPI)

Indeks Kinerja Logistik (Logistic performance Index/LPI) merupakan alat perbandingan interaktif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja dalam logistik perdagangan. LPI merupakan parameter kinerja logistik yang dirilis oleh World Bank setiap 2 tahun, sampai dengan triwulan II capaian atas IKU ini belum dapat kami sajikan (n/a), hal ini dikarenakan IKU ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Untuk mencapai target dari IKU ini, data yang digunakan dalam pemeringkatan berasal dari survei profesional logistik yang ditanyai tentang negara asing tempat mereka beroperasi. Komponen yang dianalisis dalam LPI Internasional dipilih berdasarkan penelitian teoritis dan empiris terbaru serta pengalaman praktis dari para profesional logistik yang terlibat dalam pengiriman barang internasional, yaitu:

- Efisiensi bea cukai dan izin manajemen perbatasan (Bea Cukai).
- Kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi (Infrastruktur).
- Kemudahan mengatur pengiriman dengan harga bersaing (Kemudahan mengatur pengiriman).
- Kompetensi dan kualitas layanan logistik — angkutan truk, ekspedisi, dan perantara pabean (Kualitas layanan logistik).
- Kemampuan untuk melacak dan melacak kiriman (Tracking and tracing).
- Frekuensi pengiriman mencapai penerima dalam waktu pengiriman yang dijadwalkan atau diharapkan (Ketepatan waktu).

Kemenko Marves mendorong capaian ini pada komponen Kualitas infrastruktur dan mengkoordinasikan komponen lain dengan K/L terkait. Sampai dengan triwulan II, target atas IKU dimaksud belum ditargetkan, karena IKU ini ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Capaian dari Indeks Kinerja Logistik pada triwulan II tahun 2021 dibandingkan triwulan II tahun 2020 dan target yang ingin dicapai tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 5

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
5	Indeks Kinerja Logistik	n/a	n/a	3,2	3,5

Upaya yang telah dilakukan dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2021 terhadap indeks kinerja logistik yang dilakukan Kemenko Marves, sebagai berikut:

1. NLE sudah diterapkan dengan Konsep SSm sehingga mempermudah dalam pengurusan ijin-ijin impor alkes dan vaksin.
2. Perihal sistem pembayaran, saat ini sudah bergabung satu Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri. Sistem pembayaran online di Bank Mandiri tersebut sudah dapat dilakukan satu siklus pembayaran mulai dari pemesanan DO (*delivery online*) sampai penerbitan SP2. (Surat penyerahan peti kemas)

Kedua hal tersebut ditindaklanjuti dengan:

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur untuk memastikan tercapainya dampak yang diinginkan
- Penyediaan dan penataan Infrastruktur logistik di dalam dan di luar pelabuhan
- Mengimplementasikan secara *Pilot Project* dengan mendahulukan pihak-pihak yang sudah siap dan memiliki antusiasme tinggi
- Proses dan hasilnya **di-Komunikasi-kan** kepada Publik untuk mendapatkan kontrol dan masukan.

3. Tol laut kawasan Papua dan Papua Barat telah melaksanakan kolaborasi angkutan multimoda melalui tol laut, angkutan perintis darat dan jembatan udara dengan rute Surabaya-Merauke-Oksibil (Kab.Pegunungan Bintang).Membantu distribusi beras 24 Kontainer Merauke-Jayapura. Total Muatan berangkat 6503 TEUS dan muatan balik 2372 TEUS (data per 17 juni 2021), dengan tindakanjlanjut atas program ini adalah:
- Telah dibentuk draf gugus tugas pengawasan program tol laut berdasarkan keputusan menko marves dengan melibatkan seluruh k/l terkait sesuai arahan perpres 27 tahun 2021 telah berproses secara internal.
 - Melaksanakan kegiatan *business matching* antara pelaku bisnis di daerah dan pelaku bisnis di daerah pusat agar mengurangi permasalahan imbalance cargo.

Indeks Disparitas Ekonomi

Indeks Disparitas Ekonomi bertujuan untuk mengukur pemerataan pembangunan ekonomi serta untuk memberi gambaran tentang pembangunan Infrastruktur dan Investasi maritim di Kawasan Jawa dan Kawasan Luar Jawa. Capaian tahun 2020 indeks disparitas ekonomi -0.176 direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaran PDRB ini dinilai dapat menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang diukur melalui nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.



Indeks Disparitas Ekonomi diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Disparitas Ekonomi} = \frac{\text{PDRB Luar Jawa} - \text{PDRB Jawa}}{\text{PDRB Total}}$$

***) berdasarkan indeks Williamson**

• Rumus:

$$\sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f/n}{\bar{Y}}}$$

dimana:

Y_i = PDRB percapita kecamatan

\bar{Y} = rata-rata PDRB kota

N = jumlah penduduk kecamatan

F = jumlah penduduk kota

Adapun untuk mencapai target Indeks Disparitas Ekonomi sampai akhir tahun 2021, Kemenko Marves tetap melakukan kontribusi dalam kebijakan terkait hal tersebut melalui:



Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali merilis data capaian realisasi investasi pada Triwulan II (periode April – Juni) untuk Tahun 2021, berhasil mencatat realisasi investasi triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 223 triliun, naik 16,2% dibanding periode yang sama pada tahun 2020 lalu.

Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pertumbuhan positif ini menggambarkan bangkitnya perekonomian nasional, terutama dari sektor investasi. Hal ini tentunya juga merupakan dampak positif dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah pada November 2020 lalu.

Pemerintah akan terus berkomitmen mewujudkan investasi yang berkualitas, melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan II Tahun 2021 meningkat sebesar 47,6%, dari Rp 103,6 triliun di Triwulan IV Tahun 2020 menjadi Rp 106,2 triliun di Triwulan II Tahun 2021. Investasi PMA pada Triwulan II Tahun 2021 meningkat 19,6% (y-o-y). Realisasi investasi PMA mencapai 52,4% (Rp 116,8 triliun). Kementerian



Invesatsi/BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar). Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi dengan realisasi investasi tertinggi di periode triwulan II dengan sebagai berikut: Jawa Barat (Rp 35,3 triliun, 15,8%); DKI Jakarta (Rp 25,3 triliun, 11,3 %); Jawa Timur (Rp 17,7 triliun, 7,9%); Banten (Rp 16,6 triliun, 7,5%); dan Maluku Utara (Rp 13,9 triliun, 6,3%).

Pada periode Triwulan II Tahun 2021 realisasi investasi di luar Jawa meningkat 24,6% (109,2 trilyun/49%) dari total investasi Rp. 223 trilyun sedangkan realisasi Rp. 113,8 trilyun (51%). Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan nilai Rp 31,3 triliun (14,0%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Rp 29,7 triliun, (13,3%), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp 27,9 triliun (12,5%), Listrik, Gas dan Air Rp 24,1 triliun (10,8%), dan Industri Makanan Rp 20,3 triliun (9,1%).



Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US\$ 2,1 miliar, 26,4%); Hongkong, RRT (US\$ 1,4 miliar, 18,1%); Belanda (US\$ 1,1 miliar); Jepang (US\$ 0,7 miliar, 9,0); dan R.R. Tiongkok (US\$ 0,5 miliar, 8,0%);



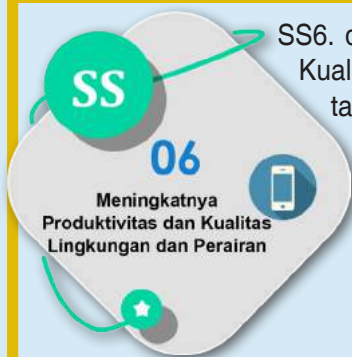
Perbandingan capaian Indeks Disparitas Ekonomi triwulan II tahun 2021 dengan tahun 2020, tahun 2020 realisasi mencapai -0.17~, pada tahun 2024 indeks ini menargetkan ~0, seperti pada tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 6

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
6	Indeks Disparitas Ekonomi	n/a	n/a	~0	~0

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Sampai dengan penyusunan laporan kinerja Triwulan II Tahun 2021 data Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 belum dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM, sehingga untuk triwulan II TA 2021 belum dapat kami sajikan (n/a). Namun demikian target atas IKU ini pengukurannya akan dilaksanakan pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Inovasi yang dilakukan untuk pencapaian target IKU untuk perolehan data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari unit kerja instansi/kementerian/lembaga lain, telah dilakukan koordinasi dengan instansi yang berkaitan. Selanjutnya koordinasi yang intensif juga akan terus dilakukan untuk perolehan data dan hasil IKU yang sudah ditetapkan. Pengukuran Indikator Kinerja Utama menggunakan data-data baik dari BPS maupun Kementerian Investasi/BKPM.



SS6. diukur dengan 2 IKU yaitu Indeks Kesehatan Laut dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum ditargetkan, capaian IKU ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 Capaian Kinerja SS.6 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
7	Indeks Kesehatan Laut	7,14	n/a	n/a	n/a
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian SS.6					n/a

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada triwulan II tahun 2021 belum dapat disajikan (n/a) karena realisasi atas IKU ini akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sedangkan target dari IKLI yang harus dicapai tahun 2021 adalah 75.

Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut antara lain:



Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) adalah nilai yang menunjukkan parameter kondisi kesehatan laut, dan bagaimana pengelolaannya untuk keberlanjutan laut di masa depan. Tujuan indeks ini adalah mewujudkan ekosistem laut yang sehat serta mengevaluasi program dan kegiatan yang mendasari pencapaian tujuan tersebut. Indeks ini diharapkan dapat membangun kesadaran serta memberikan informasi kepada pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang mempromosikan laut yang sehat.

Penilaian atas indeks tersebut menggunakan range antara 0 s.d 100, dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 100. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesehatan laut. Dalam penilaian IKLI dibutuhkan pendekatan penilaian untuk mengevaluasi kondisi laut saat ini secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari sisi/ perspective sosial, ekonomi dan lingkungan alam. Laut yang sehat berdasarkan IKLI adalah laut yang dapat bermanfaat bagi manusia secara terus menerus (berlanjut) sampai masa mendatang. Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan dari hasil akhir pengukuran Kesehatan laut berdasarkan dengan variabel pengukuran yang ditetapkan. Sepuluh goals dari Indeks Kesehatan Laut meliputi:

No	Target/Tujuan	Variabel	K/L
1.	Sumber pangan	Ikan, penangkapan, budidaya	KKP, MENKO MARITIM
2.	Mata pencaharian nelayan tradisional, skala kecil	Nelayan tradisional, akses ke sumberdaya, pendapatan, produksi, surplus produksi	KKP, MENKO MARITIM
3.	Produk alam lainnya	Produk farmasi, bahan baku industri, garam industri, garam konsumsi	DEPERIN, BUMN
4.	Sumber Carbon Biru	luasan mangrove, kondisi mangrove, rehabilitasi, reboisasi., manajemen	KKP, KLHK
5.	Perlindungan pesisir	terumbu karang, hutan pesisir, ekosistem lamun, reklamasi, konversi lahan pesisir	LIPI, BIG,
6.	Keberlanjutan Ekonomi Kelautan	Perhubungan, transportasi, perikanan, industri maritim. Pendapatan daerah/negara,	DEPHUB, BPS, KKP
7.	Pariwisata	daya dukung, jumlah wisatawan, pendapatan RT, pendapatan daerah	DEP PARIWISATA
8.	Kekhasan Ekosistem	Focal species, keragaman spesies, produksi spesies komersial, perlindungan tempat khusus, TURF, Sasi	LIPI, KKP, MENKO MARITIM
9.	Air Bersih	Sampah plastik, micro-plastic, sampah lainnya, pembuangan limbah,	MENKO, UNIVERSITAS LOKAL
10.	Keragaman hayati	Keberlanjutan ekosistem, indeks keragaman spesies	LIPI, KKP, MENKO MARITIM

Gambar 7 Goals Indeks Kesehatan Laut

Penghitungan atas pencapaian nilai variabel dari masing-masing bobot (tujuan) seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Nilai Variabel Masing-masing Bobot

No	Tujuan (Bobot Tujuan)	Nilai Variabel
1	Laut Sebagai Sumber Pangan	7,65
2	Perikanan Tradisional	7,27
3	Laut Sebagai Sumber Produk Alam	8,64
4	Laut Sebagai Penyimpan Karbon	7,66
5	Perlindungan Pesisir	5,05
6	Laut Sebagai Sumber Mata Pencaharian	7,29
7	Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	8,07
8	Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	8,32
9	Perairan Yang Bersih	5,82
10	Keanekaragaman Hayati	10
IKLI Agregat		75,79

Sumber : Pedoman Pengukuran IKLI

Perbandingan capaian triwulan II tahun 2021 dan triwulan II tahun 2020 serta target akhir tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 7

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
7	Indeks Kesehatan Laut	n/a	n/a	65	67

Seperti yang telah disampaikan pada laporan kinerja TW I tahun 2021 bahwa capaian progress yang adalah telah diputuskan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai pilot project pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao). Selanjutnya pada Triwulan II ini, progress yang dicapai adalah telah berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI). Pada kegiatan tersebut diinformasikan bahwa peran penting IKLI antara lain sebagai dasar pengelolaan laut sehat dan sebagai salah satu kebijakan dalam penyusunan RZWP3K/RTRWP. Pusat Riset Kelautan KKP diharapkan dapat mengembangkan suatu konsepsi untuk mengukur posisi kesehatan laut Indonesia. Peran stakeholders (termasuk perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika) sangat dibutuhkan untuk mendukung pengukuran IKLI di daerah (provinsi). Pengukuran IKLI di provinsi akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengukuran Ruang Laut

melalui UPT di daerah dan dibutuhkan pula peran Kementerian Dalam Negeri serta perguruan tinggi setempat.



Gambar 8 Lokasi Pilot Project Implementasi IKLI

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH adalah indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU); (2) indeks kualitas air (IKA); (3) indeks kualitas air laut (IKAL); (4) indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem Gambut (IKTL). Berdasarkan Laporan Kinerja KLHK 2020, sebagai perbandingan atas target IKLH tahun 2021, dapat kita lihat capaian tiap indikator dari tahun 2015 hingga 2020 seperti pada gambar berikut:



Gambar 9 Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015 – 2020

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, capaian atas IKU dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 8

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	n/a	67,33	68,53

Realisasi sampai dengan triwulan II, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum dapat kami sajikan (n/a), hal ini karena IKU tersebut ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Namun Demikian upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini, Kemenko Marves terus melaksanakan koordinasi dengan K/L teknis guna mendorong pencapaian target IKU.

Keterkaitan dengan RPJMN tahun 2020 - 2024

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat

Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.

4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Faktor Penghambat/Tantangan atas pencapaian IKU

1. IKLH pada RPJMN 2020 – 2024 mengalami perubahan dalam dua indikator yakni:
 - a. Indeks Kualitas Air Laut; dan
 - b. Integrasi indeks kualitas ekosistem gambut terhadap Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Metodologi perhitungan IKLH yang baru masih dalam tahap proses pematangan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) per Desember 2020. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat melakukan intervensi berupa pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka mengawal proses finalisasi metodologi perhitungan IKLH yang baru.

2. Kemenko Marves telah melakukan koordinasi beberapa program dan kegiatan terkait untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yakni:
 - a. Pengelolaan DAS Citarum
 - b. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin)
 - c. Penanganan sampah di Laut
 - d. Mengurangi Pembuangan Limbah Cair di Batam
 - e. FABA (Fly Ash and Bottom Ash)
 - f. Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 - g. Koordinasi Metodologi Perhitungan IKTL yang terintegrasi dengan indeks kualitas ekosistem gambut
 - h. Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Walaupun demikian, perlu kajian lebih lanjut mengenai korelasi antara program yang dilakukan tersebut terhadap peningkatan IKLH. Jenis IKLH ada tiga jenis namun tidak semua program dapat dilakukan intervensi atas seluruh jenis IKLH yakni IKU (Indeks Kualitas Udara). Sehingga, perlu dilakukan koordinasi lintas deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hal tersebut.

Model berbasis kerangka Pressure State Response yang memiliki indeks dan korelasi antar IKLH sebagai angka status lingkungan hidup perlu diadakan.

Adapun faktor pendukung atas pencapaian IKU ini adalah:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki peran dan fungsi sebagai koordinator sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan IKLH salah satunya yakni terdapat pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dapat mendukung IKU RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan IKU KLHK.
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang fokusnya berhubungan dengan IKLH.
3. Pada Rapat Koordinasi Pengawasan IKLH yang dilakukan oleh Dirjen PPKL KLHK menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diminta untuk mengkoordinasikan dan mengawal program-program pembangunan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan naik-turun nya angka IKLH. Bentuknya dapat berupa tagging anggaran pembangunan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - a. Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut;
 - b. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;

- d. Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut;
 - f. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
 - g. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta
 - h. Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan:
- a. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik;
 - c. Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta
 - d. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
- a. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
 - b. Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3;
 - c. Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - d. Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta
 - e. Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
- a. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
 - b. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta
 - c. Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

SS

07

Meningkatnya Produksi
Barang dan Jasa serta Nilai
Tambah Sumber Daya Alam

Tujuan dari SS.7 adalah peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional yang dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu, keempat sektor dimaksud yaitu: Kehutanan dan Penebangan Kayu; Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Pariwisata. SS.7 memiliki 2 IKU yaitu PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa dan Tingkat Komponen dalam Negeri. Capaian triwulan II tahun 2021 atas SS.7 seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 20 Capaian Kinerja SS.7 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	3.90	n/a	n/a	n/a
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	5.19	n/a	n/a	n/a
Capaian SS.7					n/a

PDB Sektor Sumberdaya Alam

Pada tahun 2020 Kemenko Marves memiliki realisasi PDB Sektor Sumber Daya Alam dan Jasa dengan sebesar 12,13 sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II, realisasinya belum dapat disajikan (n/a). Hal ini dikarenakan target dari IKU akan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Perbandingan capaian indikator ini dan target tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 9

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	n/a	n/a	16,31	17,73

PDB Sumber Daya Alam dan Jasa merupakan wujud persentase jumlah produksi yang dihasilkan di bidang sumber daya alam dan jasa maritim yang meliputi: produksi perikanan, hutan mangrove, produk kehutanan, terumbu karang, produksi mineral dan batubara produksi minyak dan gas bumi, produksi jasa yang dihasilkan dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator ini menggabungkan kontribusi (share) dari PDB sektor yaitu perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah di bidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu.

Beberapa sektor PDB Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2021 terus didorong, sehingga dapat mencapai kontribusi sesuai dengan target dari IKU ini, adapun beberapa hal atas capaian kontribusi dan upaya lainnya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II, diantaranya sebagai berikut:

1. PDB sektor pariwisata

Persentase kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS, pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan sebesar 0.01%. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 persentase kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia adalah 2.55% dan pada triwulan I tahun 2021 adalah sebesar 2,56%. Sedangkan sampai dengan triwulan II realisasi PDB dari sektor pariwisata sampai dengan laporan ini disusun belum dirilis oleh BPS. Namun demikian Kemenko Marves untuk meningkatkan nilai devisa pariwisata ekonomi kreatif dan persentase kontribusi PDB pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan beberapa kegiatan sampai triwulan II 2021, diantaranya yaitu: Koordinasi Awal Peningkatan Peringkat Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI); Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Payung Hukum ICRG Nusa Dua; Rapat Teknis Percepatan Pemulihan Perekonomian Bali melalui Skema “Work from Bali”; Rapat Peluncuran Program Indonesia Spice Up the World di Expo 2020 Dubai; Koordinasi Carbon Tax Pariwisata; Koordinasi Pemberdayaan Informasi Kekayaan Intelektual Parekraf.

2. PDB Perikanan

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19.47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.

Nilai ekspor pada sektor perikanan, pada TW II progres yang telah tercapai adalah berkaitan dengan kesiapan ekspor di Biak dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual. Sedangkan terkait produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan pada TW II progress yang telah tercapai adalah terkait dengan pengembangan M-LIN, kegiatan koordinasi implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-morotarium dan serta kegiatan koordinasi pada WPP Percontohan.

Untuk produksi perikanan budidaya, progress yang telah tercapai pada TW II adalah telah dilakukan Rapat Koordinasi pada Level Menteri dengan pembahasan terkait Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024, Penyusunan Masterplan Tambak Udang di Lokus Prioritas Major Project dan Sinkronisasi Lokus Pengembangan Kawasan Pertambakan dengan Dukungan Jaringan Irigasi Teknis dan serta telah dilakukan Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Terpadu di Seram Barat, Akselerasi Produksi Rumput Laut Kab Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar.

3. PDB Pertambangan dan Penggalian

Sesuai data tahunan 2020, PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan IV mencapai 6,48, sedangkan untuk capaian tahunan yaitu 6,44. Capaian ini masih dipengaruhi oleh kondisi Pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan permintaan.

4. PDB Kehutanan

Kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, akar dan getahnya merupakan parameter penunjang PDB sektor kehutanan. Terutama pada hasil hutan bukan kayu (HHBK), dimana produk utamanya bisa dipanen berulang, tanpa harus merusak atau mengeksploitasi tanamannya. Selain bahan yang menjadi produk, jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan system balas jasa atau kontrak juga termasuk dalam penghitungan PDB kehutanan.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk sektor kehutanan meliputi: (1) KBLI 021, terdiri atas perusahaan Hutan yang berasal dari perusahaan Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan HHBK; (2) KBLI 022 dalam bentuk penebangan dan pemungutan kayu; (3) KBLI 023 meliputi pemungutan HHBK; dan, (4) KBLI 024 meliputi jasa penunjang kehutanan.

Berdasarkan Laporan Kinerja KLHK tahun 2020, PDB sektor kehutanan menyumbang 108,63 triliun rupiah dan mencapai 19,93% terhadap target Renstra 2020-2024. Rencana Strategis KLHK Tahun 2020 – 2024 berkaitan dengan kontribusi terhadap PDB Nasional adalah:

Indikator	Realisasi TW II		Target	
	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional (Rp. Triliun)	n/a	109	112	115

Tingkat Komponen dalam Negeri

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk mengetahui berapa persen TKDN dari produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan produk logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri berupa barang dan jasa akan membangkitkan industri nasional dan akan menarik banyak investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam jangka panjang hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negeri dan membentuk kemandirian dalam berusaha

untuk peningkatan ekonomi. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 realisasi dari IKU ini belum dapat disajikan (n/a) karena target atas capaian IKU dicapai pada TW IV (akhir tahun 2021), sebagai perbandingan bahwa realisasi triwulan II tahun 2021 dan triwulan II 2020 serta target akhir tahun 2021 dari indikator TKDN sebagai berikut:

Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 10

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	n/a	n/a	45	50

Upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri disemua sektor industri selain dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Hal ini sangat mendukung perkembangan dan penguatan industri dalam negeri dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program P3DN ini sudah wajib diterapkan diberbagai sektor. Capaian pelaksanaan pemantauan P3DN triwulan II tahun 2021, yaitu:

- Pembentukan Tim Pelaksana dan Penyusunan prosedur Operasional Standar Pokja Pemantauan P3DN;
- Penyelesaian Permasalahan Conductor Pipe Pertamina Lawe-lawe
- Penyelesaian Permasalahan Offshore Pipe Pertamina RDMP Balikpapan
- Penandatanganan Nota Kesepahaman implementasi P3DN di Lingkungan PLN antara PLN dan BPPT
- Revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2020 tentang Spesifikasi, Peta jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan TKDN KBLBB
- Pemetaan Potensi Kemampuan Industri Dalam Negeri Industri Maritim
- Pemetaan Potensi Kemampuan Industri Dalam Negeri Komponen Perkeretaapian
- Telah dilaksanakan sertifikasi TKDN gratis sebanyak 1.000 sertifikat di tahun 2020, dan sebanyak 2.253 produk hingga bulan Juni 2021, total 3.253 sertifikat (Tercapai 32,5 %).

Selain itu inovasi/upaya lain dalam mendorong P3DN yang dilakukan Kemenko Marves sampai dengan triwulan II meliputi:

- Dikembangkan integrasi sistem database selanjutnya dengan SIRUP LKPP untuk produk ber TKDN,
- Pengembangan sistem integrasi dengan database produk dalam negeri di setiap K/L/BUMN (SIMPK PU PR, ESDM, AML Pertamina/PLN),
- Pengembangan sistem integrasi perijinan/fasilitasi impor produk (BKPM, Kemenkeu, Bea Cukai)

- Sistem pengaduan P3DN terintegrasi di seluruh K/L/PD/BUMN/BUMD
- Tindak lanjut pemantauan pembentukan Tim P3DN di setiap K/L/BUMN/SKPD:
- Rekapitulasi K/L/BUMN/SKPD yang sudah dan yang belum membentuk Tim P3DN
- Finalisasi sistem pelaporan terpadu pengaduan/pelanggaran P3DN
- Pengawasan BPKP terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dilakukan terhadap kemandirian Industri Farmasi dan Industri Energi.
- Mendorong potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat tahun 2021 mencapai Rp. 607.7 Trilyun dioptimalkan sebagai peluang pasar Produk Dalam Negeri
- Dilaksanakan sertifikasi lanjutan hingga 10 ribu produk.



Maksud dari SS8. Menguatnya Jati Diri Indonesia Sebagai Bangsa Bahari adalah bertambah kuatnya jiwa semangat, daya gerak, budaya, ciri khas bangsa Indonesia yang bercirikan/berkaitan dengan kelautan. SS8 memiliki 1 IKU yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi (*Global Innovation Index (GII)*), indeks ini berdasarkan data dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Cornell University dan INSEAD, capaian indeks kapabilitas inovasi triwulan II tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Kinerja SS.8 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	5.19	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 8		5.19	n/a	n/a	n/a

Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum dapat ditampilkan (n/a), hal ini dikarenakan capaian atas target IKU ini dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sedangkan pada tahun 2020 Indonesia menempati urutan ke-85 dari 131 negara dalam *Global Innovation Index (GII)* yang dikeluarkan oleh kolaborasi antara Universitas Cornell dan INSEAD, dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia berada di peringkat 85 dengan nilai 26,49. Posisi Indonesia tidak berubah dibandingkan tahun lalu yang juga berada di urutan ke-85, namun dengan skor lebih tinggi, 29,72. *GII* adalah proyek yang terus berkembang dengan menggabungkan data sebelumnya dan data baru yang tersedia. Perbandingan capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 11

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	n/a	n/a	38,6	41,5

Untuk mendorong peringkat GII Indonesia lebih baik, upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan IV 2021 yaitu: Kemenko Marves mendorong K/L teknis dengan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar semakin ditingkatkan serta melaksanakan pemantauan major project secara berkala.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong IKU tersebut sampai dengan triwulan II diantaranya lanjutan atas Program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diinisiasi oleh Kemenko Marves sejak 2020 mendapatkan apresiasi dalam Merdeka Award 2021 yang diterima pada tanggal 2 April 2021.



Tujuan dari SS.9 yaitu untuk mengukur efektifitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kemaritiman. Kebijakan Kemaritiman yang Efektif merupakan gagasan atau rancangan ketentuan bidang kemaritiman yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta dapat diimplementasikan melalui suatu ketetapan atau lainnya. SS 9 memiliki 1 IKU yaitu persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan. Realisasi dari IKU tersebut yaitu:

Tabel 25 Capaian Kinerja SS.9 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	3,90	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 9					n/a

Capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum ditampilkan (n/a), hal ini dikarenakan target dari IKU ini akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Pada indikator 12 capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 dan triwulan II tahun 2020 belum ditargetkan, dan target akhir tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 26 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 12

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2021
12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	n/a	n/a	100	100

Namun demikian, guna mencapai IKU tersebut Kemenko Marves telah merancang beberapa rekomendasi kebijakan yang selanjutnya bertahap akan ditetapkan sampai dengan TW IV (akhir tahun 2021), diantaranya sebagai berikut:

1. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap

Progres pada TW II Tahun 2021 adalah perihal koordinasi dan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Perikanan UNTIA, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan dan kunjungan koordinasi rekonstruksi industri perikanan tangkap di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

2. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan

3. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

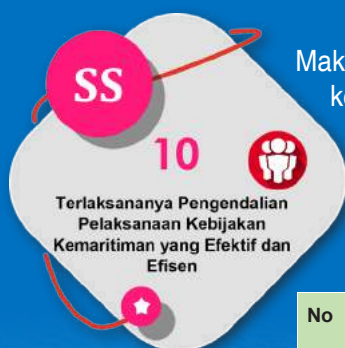
Progres pada TW II Tahun 2021 adalah perihal upaya penyelesaian kasus ekspor hasil Perikanan Indonesia ke Tiongkok terkait temuan kontaminasi covid-19 dan upaya peningkatan mutu ekspor produk kelautan dan perikanan guna pencegahan kasus penolakan oleh negara buyer.

4. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

5. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional

Progres pada TW II Tahun 2021 adalah perihal penyusunan Konsep Keputusan Tim Kerja Monitoring Pemanfaatan Garam Impor dan Penyerapan Garam Lokal oleh Industri, pembahasan progres rencana operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri kapasitas 40.000 ton/tahun di Manyar Gresik, tindak lanjut pembahasan pengaturan importasi garam, focus group discussion dan kunjungan garam PLTU di Cilegon – Banten dan pembahasan monitoring pemanfaatan garam impor dan penyerapan garam lokal oleh industri tahun 2021.





Maksud dari SS.10, adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman di K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. SS10 memiliki 1 IKU yaitu persentase (%) Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti. Realisasi dari IKU ini adalah:

Tabel 27 Capaian Kinerja SS.10 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	3,90	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 10					n/a

Capaian terhadap IKU 13 pada triwulan II tahun 2021 belum disajikan, hal ini karena IKU ini ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Adapun upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II, sebagai berikut:

1. Pengendalian perihal efisiensi Biaya NLE yang telah diterapkan di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan implementasi P3DN serta harmonisasi kebijakan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;
3. Jalan Trans Pulau Anambas

Pemenuhan target dengan dilakukannya pengendalian terkait kegiatan pembangunan fisik jalan dari total anggaran 16 M untuk 4 km jalan aspal dan 3,4 km jalan pengerasan dengan progres pelaksanaan 100% yang sedang dilaksanakan oleh Satker PUPR BPJN IV, Skema pembayaran tahun 2020 dimana anggarannya mengalami refocusing covid-19 senilai 8 M maka pembayaran direlaksasi hingga awal tahun 2021. Penuntasan pembangunan jalan yang kurang 4 km untuk tembus ke pelabuhan akan diselesaikan pada tahun 2021.

Faktor pendukung dan penghambat sampai dengan triwulan II atas capaian IKU 13 sebagai berikut:

Penghambat:

1. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan medan geografis yang sulit aksesnya
2. Distribusi penduduk yang tidak merata
3. Pandemic Covid-19 yang masih melanda sebagian wilayah Indonesia hingga tahun 2021;
4. Beberapa regulasi yang rumit;
5. Biaya logistic yang masih tergolong mahal.

Proyek Strategis Nasional

Meliputi 15 Sektor pada Tingkat Proyek dan 2 Sektor pada Tingkat Program



Sedangkan faktor pendukung:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pengawalan proyek-proyek strategis pemerintah dan juga proyek prioritas
2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pembuatan rekomendasi kebijakan ataupun pengendalian kebijakan guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target IKU selanjutnya koordinasi yang intensif juga akan terus dilakukan untuk perolehan data dan hasil IKU yang sudah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan bidang kemaritiman dan investasi.

Pada indikator 13 capaian sampai triwulan II tahun 2021 belum ditargetkan, begitu juga capaian atas triwulan II tahun 2020 belum ditargetkan, dan target sampai akhir tahun 2021 100%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 28 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 13

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	100

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Kemenko Marves. SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Kemenko Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi tugas dan fungsinya karena SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Kemenko Marves terus berupaya menyediakan SDM yang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas lingkup Kemenko Marves.



Maksud dari SS.11, adalah terwujudnya Pengelolaan ASN di Kemenko Marves yang berkarakter melalui sikap dan perilaku yang menghasilkan output kerja yang unggul. IKU dari SS ini yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Tujuannya untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN serta sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Capaian tahun 2021 IKU dimaksud sampai dengan triwulan II belum ditargetkan (n/a), hal ini karena capaian atas IKU ini pada triwulan IV (akhir tahun 2021), target tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari BKN akan diketahui pada akhir tahun 2021 sehingga akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 di tahun 2022. Adapun tabel berikut menampilkan capaian atas IKU 14, sebagai berikut:

Tabel 29 Capaian Kinerja SS.11 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
14	Indeks Profesionalitas ASN	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 11					n/a

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasilnya sebagai dasar penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai ASN. Dasar hukum pengukuran adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.

Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tingkat profesionalitas pegawai ASN yang terdiri atas identitas pegawai, dimensi, deskripsi, dan indikator beserta petunjuk pengisiannya. Adapun pembobotan atas dimensi yaitu sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh nilai Indeks Perofesionalitas ASN untuk tahun 2019 sebesar 82.00. Proses penghitungan Indeks Profesionalitas ASN tersebut dapat juga dilihat melalui aplikasi <https://ip-jasn.bkn.go.id>. Indeks profesionalitas ASN tahun 2021 hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum keluar, sehingga capaian sampai dengan triwulan II 2021 belum dapat diperoleh. Namun demikian sampai dengan TW II, bagian

kepegawaian telah dibuat Nota Dinas yang ditujukan ke masing-masing unit kerja perihal permintaan dokumen kepegawaian yang dibutuhkan bagi penilaian indeks profesionalitas ASN. Bagian Kepegawaian telah melakukan proses unggah data yang menjadi indikator penilaian indeks profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) di dalam aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Pada tahun 2021, Kemenko Marves menargetkan nilai IKU Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85.00 yang akan dicapai pada TW IV.

Success story

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kemenko Marves Tahun 2020 adalah sebesar 82 dengan kategori tinggi. Pencapaian ini melampaui target sebesar 71. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020, dari 35 Kementerian Lembaga yang diukur Indeks Profesionalitas ASN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat urutan nomor 3 tertinggi dengan kategori tinggi. Jika dianalisa, pencapaian ini didukung dengan peran aktif dari seluruh ASN Kemenko Marves terhadap pemenuhan indikator dalam Indeks Profesionalitas ASN.



Selain itu Kemenko Marves sampai pada Triwulan II tahun 2021 mendapat penghargaan BKN Award 2021 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, pelayanan Pengadaan, kejangkauan dan pensiun dari BKN, yang diberikan pada bulan Juni 2021.

Inovasi:

Bagian Kepegawaian terus memaksimalkan pengumpulan SKP seluruh pegawai dengan cara berkoordinasi dengan bagian TU di masing-masing unit kerja, pengiriman pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat, dan pengembangan kompetensi lainnya serta mengintegrasikan kinerja pegawai melalui eSKP bekerjasama dengan unit kerja di lingkup Setmenko Marves.

Tabel 30 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 14

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
14	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	73	81



Maksud dari SS12, yaitu untuk mewujudkan Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Marves. IKU yang digunakan yakni Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dengan realisasi triwulan II, hasil penilaian KemenPAN & RB tahun 2021 atas IKU ini dikeluarkan pada bulan Maret 2021, namun sampai dengan laporan kinerja triwulan II disusun Kemenko Marves belum menerima hasil penilaian atas IKU ini, sehingga capaian IKU ini akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 pada laporan kinerja triwulan II tahun 2021. Capaian triwulan II seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31 Capaian Kinerja SS.12 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	7,14	80	75,18	93,98
Capaian Kinerja SS 12					93,98

*) Realisasi berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB dari Kementerian PAN-RB.

Persentase ini adalah nilai implementasi pengelolaan RB pada 8 area perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: a) Manajemen perubahan; b) Penataan peraturan perundang-undangan; c) Penataan dan penguatan organisasi; d) Penataan tatalaksana; e) Penataan sistem manajemen; f) Penguatan akuntabilitas; g) Penguatan pengawasan; dan h) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves di tahun 2021 sebesar 80 menjadi target realistis menurut Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mencapai target tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada TW II 2021 sesuai dengan realisasi rencana kerja reformasi birokrasi Kemenko Marves sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Membentuk Tim Perubahan Kemenko Marves beserta penyusunan rencana kerjanya, sosialisasi roadmap RB Kemenko Marves tahun 2020-2024, dan melaksanakan PMPRB.

2. Deregulasi Kebijakan

Melakukan penyusunan, identifikasi, pemetaan, analisis, dan revisi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron bidang Kemaritiman dan Investasi.

3. Penataan Organisasi dan Tata Laksana

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

5. Penguatan Akuntabilitas

6. Penguatan Pengawasan

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi factor penting bagi keberhasilan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja lingkup Kemenko Marves. Dalam hal ini, Biro Hukum sebagai leading sector pengelolaan RB di Kemenko Marves telah optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi Reformasi Birokrasi di Kemenko Marves.

Sesuai Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, secara interpretasi suatu instansi telah mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi >80-90 telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja. Namun Kemenko Marves belum dapat memenuhi kriteria tersebut dikarenakan pembayaran tunjangan kinerja yang masih berbasis absen.

Indikator lainnya terkendala oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa agenda tidak telaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan bukti dukung Reformasi Birokrasi menjadi hal yang sangat penting mengingat segala capaian di 8 area perubahan Reformasi Birokrasi harus didokumentasikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, Kemenko Marves melakukan inovasi berupa penggunaan aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) untuk mengumpulkan bukti dukung secara elektronik di Kemenko Marves yang memudahkan pengguna. Aplikasi E-RB ini juga telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB untuk dijadikan benchmarking bagi instansi lain.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dari tahun 2016-2020 nilainya meningkat sebagaimana pada tabel dan masuk dalam kategori baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2020, sesuai surat Menteri PAN dan RB Nomor B/34/M. RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Kemenko Marves mendapatkan nilai indeks RB sebesar 75.18 dengan kategori BB dan berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%.

Tabel 32 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2016	60.34
2017	62.82
2018	65.95
2019	69.13
2020	75.18

Adapun perbandingan capaian indikator 15 triwulan II tahun 2021 dan triwulan II 2020 serta target akhir tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 33 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 15

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	69.13	75.18	80	95



Tujuan dari SS.13 adalah 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel; 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; serta 3) Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sedangkan maksud dari Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang terintegrasi adalah rangkaian proses yang menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional lingkup Kemenko Marves. SS13 memiliki 1 buah IKU yaitu Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator SPBE, yang mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan dapat dilanjutkan dengan Penilaian Visitasi berdasarkan PermenPANRB tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk capaian atas IKU ini, sampai dengan TW II belum dapat disajikan (n/a), karena nilai penyelenggaraan SPBE dari KemenPANRB baru dirilis pada akhir tahun 2021. Beberapa langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendongkrak indeks SPBE sampai dengan Triwulan II antara lain telah dibentuk Tim Koordinator dan Tim Assesor yang ditandatangani oleh Sekeretaris Kementerian Koordinator atas nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan

pemantapan internalisasi maupun dalam pemenuhan evidence untuk 47 indikator SPBE, baik melalui sosialisasi maupun workshop monitoring dan evaluasi mandiri SPBE.

Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi mandiri dilaksanakan tanggal 23 Juni 2021, dengan indeks SPBE sebesar 3.02 (nilai indeks sementara), serta masih ada tahapan selanjutnya yaitu penilaian interviu pada tanggal 20 Juli-23 Agustus 2021. Sebagai penentuan final Indeks SPBE, akan dilakukan visitasi tanggal 23 September-1 Oktober 2021 mendatang. Capaian indeks SPBE Tahun 2021 untuk sementara mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 (2.52) dan telah mencapai target pada IKU Tahun 2021 yaitu 3.00.

MONITROTING & EVALUASI SPBE 2021
(Surat Menteri PAN RB, No. B/232/M.KT.03/2021 tanggal 15 April 2021)

No	Kegiatan	Waktu	Ket
1.	Sosialisasi evaluasi mandiri	20-29 April 2021	✔
2.	Penilaian mandiri	28 April-18 Juni 2021	✔
3.	Penilaian interviu	20 Juli-23 Agustus 2021	
4.	Penilaian visitasi (bila diperlukan)	23 September-1 Oktober 2021	

Evidence telah diupload (47 indikator)

Hasil Evaluasi SPBE 2021

Nama Form Tahun	Evaluasi SPBE 2021
Deskripsi	Evaluasi SPBE 2021
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	
K/L/D	Kementerian
Indeks SPBE	3,21
Predikat SPBE	Baik

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	5
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	5
Domain Tata Kelola SPBE	3
Perencanaan Strategis SPBE	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Penyelenggara SPBE	3,5
Domain Manajemen SPBE	2,16
Penerapan Manajemen SPBE	1,88
Audit TIK	3
Domain Layanan SPBE	3,16
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3

NILAI INDEKS SPBE 2021

3.21

Tabel 34 Capaian Kinerja SS.13 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 13					n/a

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE. Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penyerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level. Masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5, 0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (Indeks minimal 2,6)

Tabel 35 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 16

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	n/a	3,3	4,0



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan IKU dari SS.14. Maksud dari SS ini adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Marves yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK yang menjadi sasaran target pada TA. 2021 adalah opini BPK hasil pelaksanaan penggunaan anggaran pada TA. 2020. Hal ini disebabkan karena Opini BPK TA. 2020 baru disampaikan pada akhir triwulan II atau di Triwulan II TA. 2021. Sampai dengan laporan ini disusun hasil atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK atas Kemenko Marves belum diumumkan secara resmi. Sehingga capaian atas IKU ini belum dapat disajikan walaupun Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 memperoleh hasil WTP (LHP Nomor: 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021). Dan kami akan sajikan hasil atas capaian IKU ini pada laporan kinerja TW III tahun 2021. Realisasi atas IKU tersebut, tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 36 Capaian Kinerja SS.14 TW II

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
17	Opini BPK	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 14					n/a

Kemenko Marves sudah melakukan pembahasan secara internal dan menindaklanjuti hasil temuan BPK berupa tanggapan tertulis atas konsep temuan BPK dan menyiapkan draft action plan terkait rencana Kemenko Marves dalam mengatasi hasil temuan BPK tahun 2020. Pada TW II, ada beberapa temuan BPK yang sudah selesai ditindaklanjuti. BPK juga memantau pelaksanaan dari action plan yang telah dibuat oleh Kemenko Marves.

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Kemenko Marves dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain: (1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan Keuangan, (2) Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, (3) Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian

atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis, dan (4) melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Marves dalam rangka pencapaian IKU-6 Opini atas Laporan Keuangan Kemenko Marves terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenko Marves Tahun 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing unit kerja eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Inspektorat dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kemenko Marves.

Success story

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berturut-turut setiap tahun mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini WTP ini dapat tercapai karena kerja keras dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk melaksanakan realisasi anggaran dan pelaksanaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Inovasi

Akan terus mempertahankan opini WTP dari BPK dengan melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, dan akuntabel.

Perbandingan capaian triwulan II 2021 dan triwulan II 2020 serta target tahun 2021 indikator Opini BPK sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 17

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target 2024
17	Opini BPK	n/a	n/a	WTP	WTP



3.2. Capaian Lainnya

Prestasi sampai dengan TW II 2021:

1. Penghargaan BKN Award 2021 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, pelayanan Pengadaan, kepengkatan dan pensiun dari BKN, yang diberikan pada bulan Juni 2021.

Inovasi

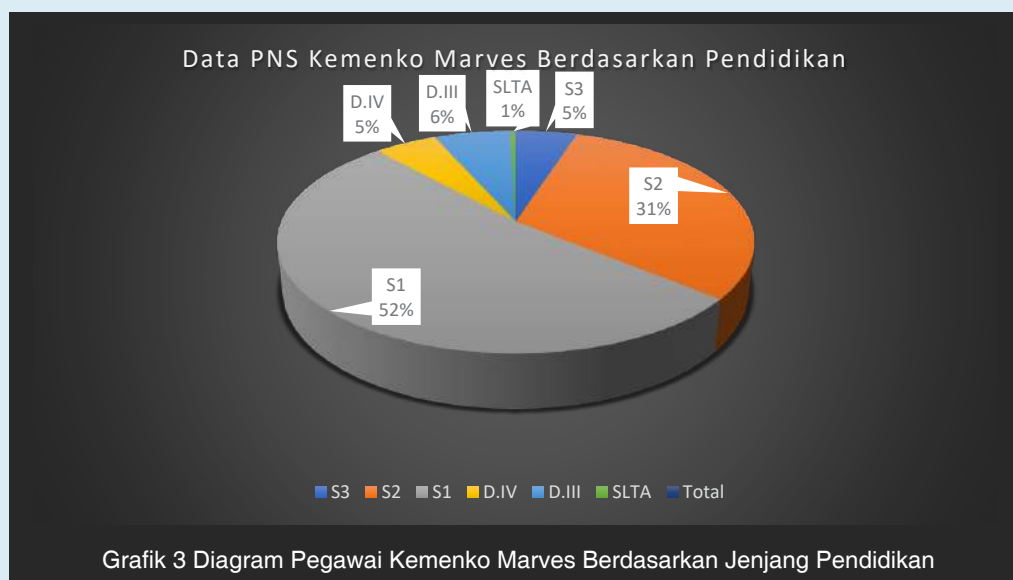
1. Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai IKU ini yakni dengan mendongkrak indeks SPBE melalui langkah sebagai berikut:
 - Pembentukan SK Koordinator dan SK Tim assesor SPBE; Penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE (dalam proses drafting); Pembuatan Surat Edaran Sesmenko terkait kebijakan tata Kelola SPBE; Pemenuhan seluruh evidence terkait 47 indikator SPBE, antara lain video yang berisi komitmen Menko Marves dan Sesmenko dalam melaksanakan SPBE di lingkup kemenko Karves, serta video produk unggulan terkait layanan administrasi berbasis digital yaitu marvescore, marves HR, JDIH, PPID, layanan e Lapor, dan marves dalam angka (MDA) berbasis dashboard website berisi informasi untuk mendukung Kedeputusan terkait informasi 7 (tujuh) K/L dibawah Kemenko Marves.
 - Dalam rangka peningkatan layanan administrasi berbasis aplikasi, telah dilakukan percepatan target interoperabilitas antar aplikasi, yaitu melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu aplikasi umum: KRISNA, SAKTI, e-SKP dan MySAPK, SAKIP serta SRIKANDI, yaitu Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan-Bappenas, Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran-Kementerian Keuangan, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN-BKN, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III-Kemen PAN RB serta Pusat Data dan Informasi-ANRI.

2. Inovasi untuk pencapaian Temuan Finansial BPK, diantaranya:

- Membuat aturan internal tentang perhitungan perjalanan dinas luar negeri;
- Melakukan audit perjalanan dinas oleh Inspektorat sebelum audit BPK dan semua Mitra Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat;
- Penganggaran belanja honor operasional satuan kerja untuk pembayaran uang saku pelaksanaan reviu dan audit internal sudah sesuai dengan ketentuan;
- Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sudah sesuai ketentuan;
- Kemenko Marves telah merevisi Surat Keputusan Kemenko Maritim tentang kelas jabatan dan merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja untuk jabatan yang tidak ditetapkan dalam Sk Kemenko Maritim dan/atau dalam persetujuan Kemen PAN & RB;
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sudah didukung dengan bukti yang lengkap;
- Sudah tidak ada kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan instalasi cooling tower tambahan;
- Pekerjaan serupa dilaksanakan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018

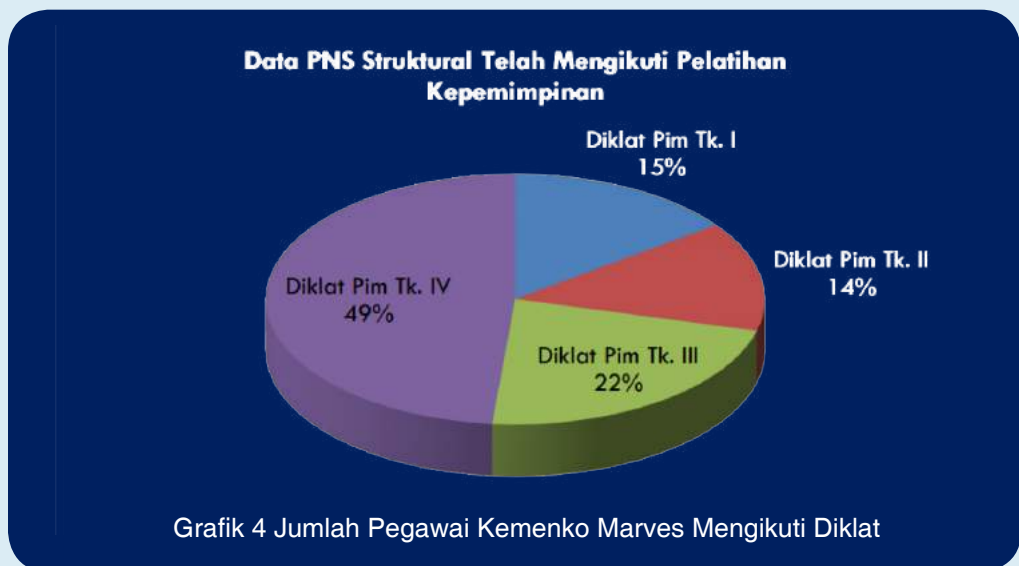
Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 426 ASN di lingkungan Kemenko Marves pada tahun 2021, hanya 21 pegawai (5%) yang merupakan lulusan S3, dan 31% (131 pegawai) yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 221 pegawai atau 52 % dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 25 pegawai (6%), lulusan D.III sebanyak 6% (26 pegawai) dan SLTA 0,46% (2 pegawai). Kemenko Marves ke depan merencanakan peningkatan grade calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2. Data pegawai berdasarkan Pendidikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Dari total 11 Pejabat Tinggi Madya, terdapat 2 pejabat yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Dari keseluruhan 39 Pejabat Tinggi Pratama, terdapat 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. sejumlah 5 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat II, 3 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Dari total 94 pejabat administrator, sejumlah 22 pejabat telah mengikuti pelatihan administrator (Pim Tk. III) dan 29 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV), serta dari total 54 pejabat pengawas, sejumlah 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator (Pim Tk.III) dan 37 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV).

Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat fungsional masih sangat rendah yakni sebanyak 34 orang dan belum ada pegawai yang mengikuti diklat teknis. Namun demikian, jumlah pegawai yang telah mengikuti workshop dan seminar tercatat sebanyak 355 orang dengan rincian sebagai berikut:



3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Kemenko Marves TA. 2021 telah disahkan pada tanggal 23 November 2020, dengan terbitnya DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01-0/2021 dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 314.596.417.000 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah),-, namun dengan adanya kebijakan refocusing dari DJA Kementerian Keuangan, Kemenko Marves melakukan revisi sesuai dengan terbitnya DIPA terbaru Nomor: SP DIPA- 120.01.1.350494/2021, tanggal 16 Februari 2021 dengan jumlah DIPA sebesar Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Tahun 2021 masih dihadapi dengan kondisi pandemic Covid 19, sehingga anggaran belanja seluruh K/L mengalami perubahan/refocusing. Sebagian dialokasikan tetap untuk penanganan Covid-19. Demikian pula dengan Kemenko Marves, atas arahan

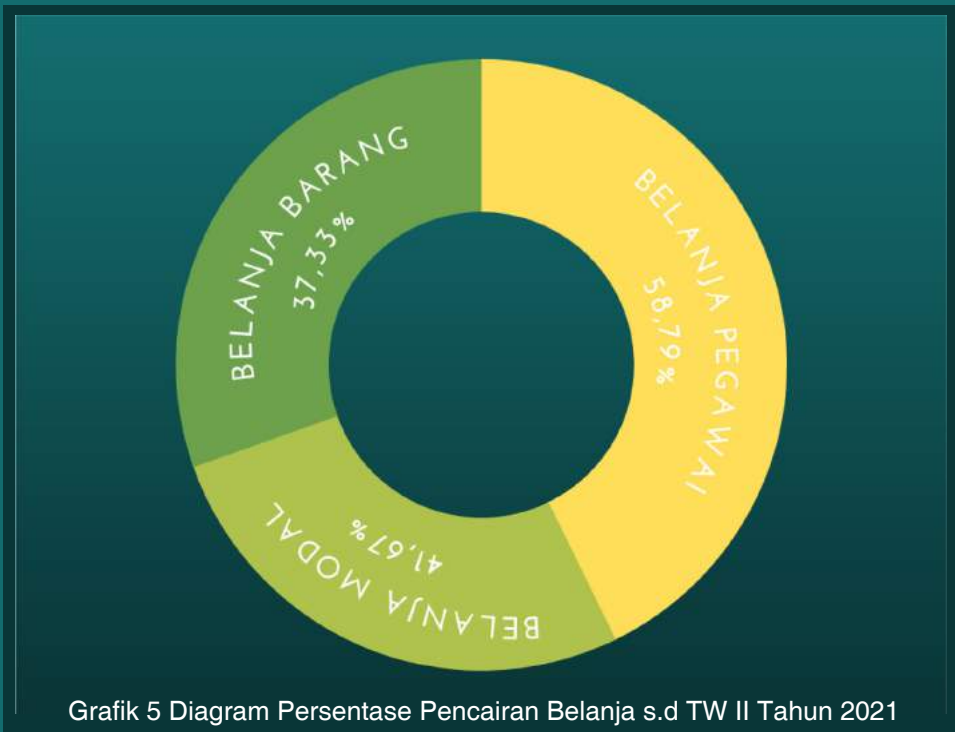
Presiden telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran. Namun demikian dilihat dari sisi realisasi anggaran, Kemenko Marves memiliki tingkat penyerapan anggaran sampai triwulan II 2021 yaitu sebesar 24,77% dengan nilai Rp. 66.770.366.752 (Enam Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Realisasi per Jenis Belanja

Dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 284.452.093.000, secara garis besar terdiri dari 4 jenis belanja, namun Kemenko Marves hanya melaksanakan 3 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai dengan pagu Rp. 55.028.210.000 dengan realisasi Rp. 32.350.620.164,- (58,79%); belanja barang dengan pagu anggaran Rp. 224.984.014.000,- dengan realisasi Rp. 83.988.563.187,- (37,33%) dan belanja modal Rp. 4.439.869.000,- dengan realisasi Rp. 1.849.885.500,- (41,67%). Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran belanja pada Kemenko Marves mencapai 41,55% (Rp. 118.189.068.851,-). Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 38 Realisasi Belanja s.d Triwulan II Tahun 2021

Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Pegawai	55.028.210.000	32.350.620.164	58,79%	22.677.589.836
Barang	224.984.014.000	83.988.563.187	37,33%	140.995.450.813
Modal	4.439.869.000	1.849.885.500	41,67%	2.589.983.500
Total	284.452.093.000	118.189.068.851	41,55%	166.263.024.149



Dari tabel dan diagram tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tertinggi dari belanja pegawai mencapai 58,79% atau Rp. 32.350.620.164,- sedangkan belanja terendah adalah belanja barang dengan realisasi 37,33 % atau Rp. 83.988.563.187,.

Realisasi per Unit Kerja

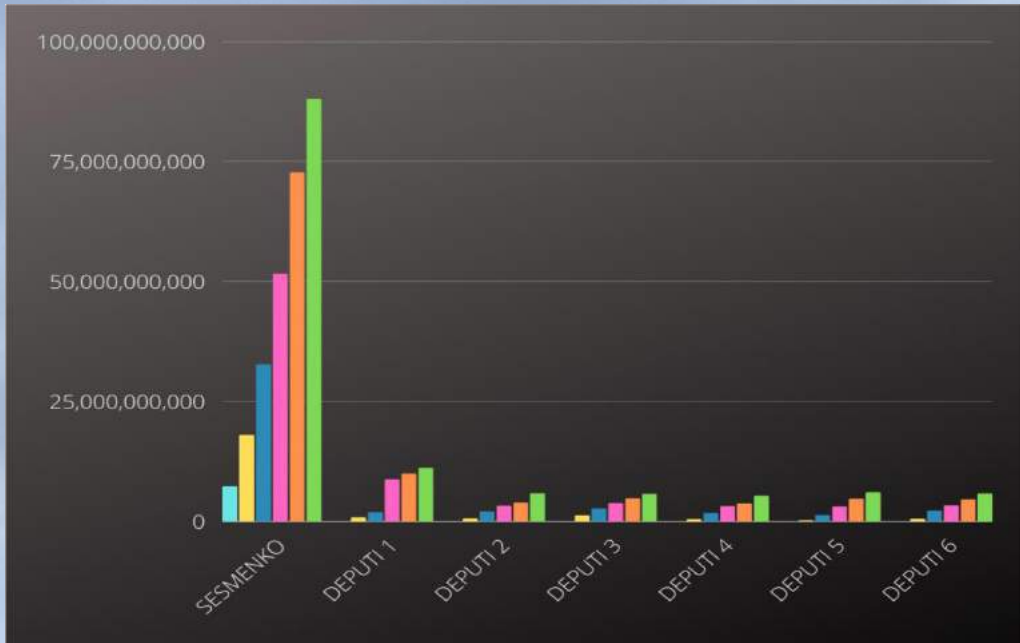
Dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dan ditargetkan, setiap unit kerja memiliki target kinerja triwulan dan tahunan pada 2021. Pada triwulan II TA. 2021 anggaran tiap unit kerja pada Kemenko Marves disajikan pagu anggaran dan realisasi pada grafik berikut ini:

Tabel 39 Realisasi Belanja Per Unit Eselon I s.d TW II Tahun 2021

UNIT KERJA	JANUARI			FEBRUARI			MARET		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
SESMENKO	174,096,418,000	7,381,421,309	4.24%	170,860,752,000	18,005,427,421	10.54%	170,860,752,000	32,743,501,721	19.16%
DEPUTI 1	64,250,000,000	-	0.00%	47,450,666,000	840,607,086	1.77%	47,450,666,000	1,875,134,091	3.95%
DEPUTI 2	14,300,000,000	-	0.00%	14,300,000,000	630,459,583	4.41%	14,300,000,000	2,043,233,037	14.29%
DEPUTI 3	14,449,999,000	-	0.00%	14,449,999,000	1,271,431,048	8.80%	14,449,999,000	2,664,509,455	18.44%
DEPUTI 4	14,075,000,000	-	0.00%	14,075,000,000	453,549,323	3.22%	14,075,000,000	1,683,221,123	11.96%
DEPUTI 5	14,200,000,000	-	0.00%	14,200,000,000	227,112,158	1.60%	14,200,000,000	1,303,103,531	9.18%
DEPUTI 6	19,225,000,000	-	0.00%	19,225,000,000	568,326,756	2.96%	19,225,000,000	2,214,209,326	11.52%
JANUARI	314,596,417,000	7,381,421,309	2.35%	294,561,417,000	21,996,913,375	7.47%	294,561,417,000	44,526,912,284	15.12%
UNIT KERJA	APRIL			MEI			JUNI		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
SESMENKO	170,860,752,000	51,571,754,896	30.18%	164,594,802,000	72,686,693,673	44.16%	164,594,802,000	88,025,634,093	53.48%
DEPUTI 1	47,450,666,000	8,663,237,962	18.26%	47,450,666,000	9,816,239,432	20.69%	47,450,666,000	10,995,104,721	23.17%
DEPUTI 2	14,300,000,000	3,171,959,183	22.18%	14,300,000,000	3,833,296,860	26.81%	14,300,000,000	5,748,764,977	40.20%
DEPUTI 3	14,449,999,000	3,709,333,716	25.67%	14,449,999,000	4,688,501,563	32.45%	14,449,999,000	5,624,586,781	38.92%
DEPUTI 4	14,075,000,000	3,060,359,927	21.74%	14,075,000,000	3,630,601,026	25.79%	14,075,000,000	5,231,075,297	37.17%
DEPUTI 5	14,200,000,000	3,016,307,796	21.24%	14,200,000,000	4,588,624,850	32.31%	14,200,000,000	5,930,114,954	41.76%
DEPUTI 6	19,225,000,000	3,267,481,869	17.00%	19,225,000,000	4,442,132,377	23.11%	19,225,000,000	5,695,517,448	29.63%
APRIL	294,561,417,000	76,460,435,349	25.96%	288,295,467,000	103,686,089,781	35.97%	288,295,467,000	127,250,798,271	44.14%

Sumber: OMSPAN, 2021

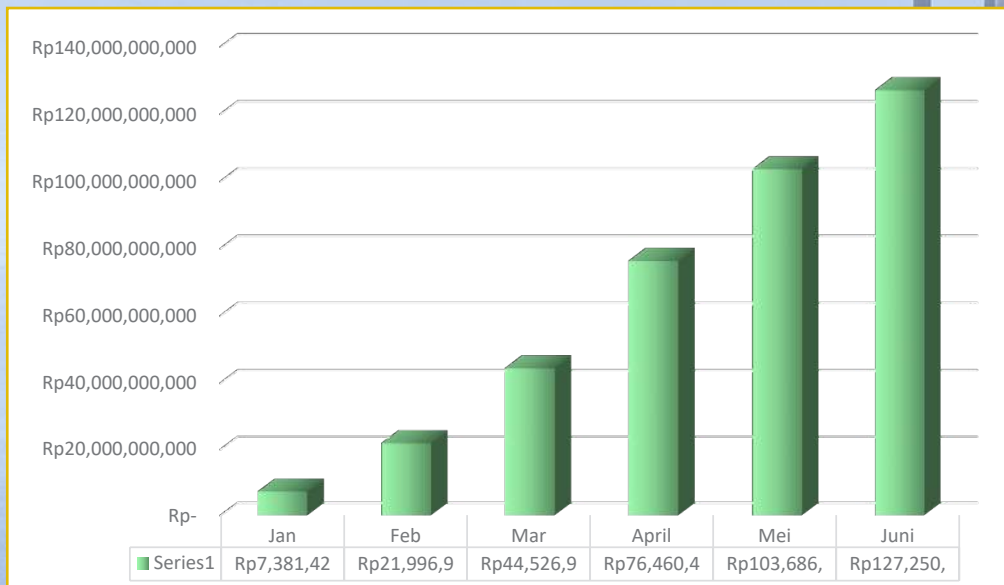
Dari tabel di atas juga nampak bahwa persentase realisasi sampai dengan triwulan II dari pagu anggaran pada masing-masing unit kerja tidak terlalu jauh perbedaannya. Unit Eselon I dengan nilai persentase realisasi keuangan tertinggi adalah Sekretariat Kemenko Rp. 88.025.634.93 (53,48%). Sementara unit dengan nilai persentase realisasi terendah adalah Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Rp. 10.995.104.721 (23,17%).



Grafik 5. Nilai Persentase Realisasi Keuangan Tertinggi TA. 2021

Realisasi per Bulan

Realisasi anggaran perbulan sampai dengan triwulan II tahun 2021 tidak merata namun realisasi setiap bulannya mengalami peningkatan, kendati masih dihadapi dengan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja setiap bulannya. Lonjakan terjadi pada bulan Juni, setiap unit kerja Eselon I mengalami peningkatan realisasi belanja dibanding bulan sebelumnya seperti terlihat pada grafik berikut:



Sumber: OMSPAN, 2021

Grafik 6 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021

Penutup

04

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kemenko Marves. Sejak tahun 2016 Kemenko Marves telah menerapkan model *Balanced Score Card* (BSC) dalam pengelolaan kinerjanya. Salah satu keunggulan pengelolaan kinerja dengan konsep BSC adalah disusunnya Strategi Kemenko Marves yang komprehensif dalam suatu peta strategi yang mencakup empat perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Dalam implementasinya, Kemenko Marves terus berusaha untuk menyempurnakan model pengelolaan kinerja dengan konsep BSC agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan best practice sektor publik secara internasional. Dari masing-masing perspektif tersebut, Kemenko Marves kemudian merumuskan sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kemenko Marves. SS, IKU dan target kinerja tersebut kemudian dimuat dalam dokumen Komitmen Kinerja Menko Marves dan Deputi. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah dashboard yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenko Marves yang dikenal dengan nama Peta Strategi Kemenko Marves.

Peta strategi tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) ke seluruh unit eselon I sampai dengan level terendah di Kemenko Marves, serta dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan dilaksanakannya proses *cascading* dan *alignment*, pencapaian strategi Kemenko Marves diharapkan selaras dan didukung oleh seluruh unit dan pegawai pada setiap level. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenko Marves meliputi seluruh tahapan dalam eksekusi strategi Kemenko Marves yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, review dan penyempurnaan kontrak kinerja.

4.1. Kesimpulan

- a. Laporan kinerja Kemenko Marves sampai dengan triwulan II Tahun 2021 belum dapat menyajikan secara keseluruhan atas capaian dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kemenko Marves tahun 2021, dari 17 IKU yang diperjanjikan, sampai dengan triwulan II, 1 capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves tercapai 75,18 dari target 80 pada tahun 2021 sehingga tercapai 93,98%, namun demikian Kemenko Marves berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%. Beberapa upaya untuk mencapai berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian yang strategis pada periode tahun 2020 di evaluasi dan ditingkatkan pada tahun 2021.
- b. Indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 (tidak mengalami perubahan), hal ini merupakan kelanjutan atas pelaksanaan Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024 pada tahun kedua.
- c. Secara umum, angka capaian kinerja Kemenko Marves tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dimana capaian kinerja Kemenko Marves belum ditargetkan, namun demikian realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 44,14%, dengan tingkat penyerapan dengan nilai persentase realisasi keuangan tertinggi adalah Sekretariat Kemenko Rp. 88.025.634.093,- (53,48%). Sementara unit dengan nilai persentase realisasi terendah adalah unit Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Rp. 10.995.104.721,- (23,17%).
- d. Dinamika eksternal yang masih dihadapi dengan kondisi menghadapi pandemi Covid-19 dan kebijakan Pemerintah dengan penerapan PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali sampai dengan akhir bulan Juli 2021 agak mempengaruhi terhadap upaya yang dilakukan Kemenko Marves dalam mencapai target atas capaian kinerja. Beberapa koordinasi tetap dilaksanakan secara daring dengan stakeholders terkait sama seperti tahun sebelumnya (2020), untuk mendorong akselerasi pencapaian target kinerja.
- e. Mulai tumbuhnya kesadaran unit kerja pendukung dalam melaporkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II walaupun terlambat dalam penyampaian sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketaatan penyampaian pelaporan unit kerja menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali pada triwulan selanjutnya.

4.2. Langkah Perbaikan Kedepan

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan unit kerja untuk mendukung kapasitas pelaporan terus ditingkatkan terutama dalam menyampaikan data dukung serta keberhasilan, kegagalan, inovasi dan success story terhadap pencapaian indikator kinerja Menko Marves yang telah diperjanjikan dalam PK tahun 2021.
- b. Setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Kemenko Marves tahun 2020 – 2024 maupun dalam Perjanjian Kinerja agar rutin disampaikan unit kerja pelaksana IKU, untuk dapat diketahui dan dilaporkan tingkat perkembangan atas capaian dari target IKU.
- c. Perlu dilakukan peningkatan pemutahiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
- d. Laporan Kinerja Triwulan II agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja sepanjang tahun 2021, sehingga target kinerja dapat dicapai dan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2021.

Harapannya, laporan triwulan II ini dapat menjadi umpan balik dalam proses capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, sehingga SAKIP di Kemenko Marves dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kemenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves. Semoga

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
Stakeholders Perspective				
SS.1	Teguhnya Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim Yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	>=3
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	6,63
SS3	Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Bet kepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	65
Customer Perspective				
SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Tingkat Kedaulatan Maritim	3
SS5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	3,1
		6	Disparitas Ekonomi Antar Wilayah	-0
SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	75
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,33
SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	PDB dari Sektor Sumber Daya Alam dan Jasa	16.31
		10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	45
SS.8	Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	38,6
Internal Business Process Perspective				
SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti	100
Internal Business Process Perspective				
SS.11	Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten	14	Indeks Profesionalitas ASN	85
SS.12	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	15	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SS 13	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	16	Indeks SPBE	3.3
SS 14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	17	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 193.888.318.000
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 120.708.099.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 314.596.417.000

Jakarta, Januari 2021
Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi RI



Luhut B. Pandjaitan

Tim Penyusun

PENASEHAT

**Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan**

PENGARAH

**Sekretaris Kementerian Koordinator
Agung Kuswandono**

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan
Arif Rahman

PENYUSUN

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja

Yetri Fermila

Kepala Bagian Program Dan Anggaran

Achmad Murman

Kepala Bagian Persidangan

Laode Aulia Rahman Hakim

Kepala Bagian Kebijakan Strategis

Muhammad Ghazali Unus

Kepala Subbagian Pengelolaan Dan Pengukuran
Kinerja

Nuzulia Yuaniva

Kepala Subbagian Dukungan Akuntabilitas Kinerja

Happy Budi Baswara

Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja

Indra Nugraha

Sari Dewi Maharani

Andi Juwandi

Sigit Nugroho

Deby Purnama

EDITOR

Kasubbag Pelaporan Kinerja

Indra Nugraha

Pelaksana Subbagian Pelaporan Kinerja

Andini Mey Larasati

Anisa Nurhadaya Pramitha

KONTRIBUTOR:

Inspektur

Kepala Biro Hukum

Kepala Biro Komunikasi

Kepala Biro Umum

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Daya Maritim

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
dan Transportasi

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan
Pertambangan

Kabag Program lingkup Deputi pada Kemenko
Marves

Kabag Adum pada Inspektorat

Kasubbag TU lingkup Setmenko Marves

Kasubbag Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
lingkup Deputi pada Kemenko Marves

Kasubbag Pelaporan Inspektorat

Foto Dokumentasi

Tim Humas Biro Komunikasi

Produksi

Biro Perencanaan, Gd. Kemenko Marves Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10340